



Rancangan Akhir
RENSTRA
2025-2029

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 340);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhitung sejak tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah /Rumah Sakit Khusus Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - g. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kerja, dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan;

- n. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - cc. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - dd. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - ee. Badan Pendapatan Daerah;
 - ff. Badan Kepegawaian Daerah;
 - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ii. Badan Penghubung Daerah; dan
 - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memuat rencana strategis unit kerja Perangkat Daerah yang terdiri:
- a. rencana strategis biro pada Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis rumah sakit Daerah pada Dinas Kesehatan; dan
 - c. rencana strategis unit pelaksana teknis Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-

- undangan yang lebih tinggi;
- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
 - e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 26 September 2025



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal, 26 September 2025



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

JEFFRI RAHMAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0402/111/Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 707/VII/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Gubernur Sulawesi Selatan Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:
- a. Ketua Tim bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan serta substansi pokok naskah Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2025-2029;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja bertugas dan bertanggungjawab dalam persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, mengusulkan rancangan akhir untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan u.p Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10-03-2025

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,



REZA FAISAL SALEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Badan	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusunan Renja berjalan dengan baik
2	Sekretaris	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Penyusunan Renja di Bapenda
3	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bidang data dan Informasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi Objek dan Subjek Pajak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bidang Pengawasan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15	Kepala Sub Bidang PAD I	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bidang PAD II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Sub Bidang Peraturan Pendapatan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Muhammad Hardi S.STP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Amelia Putriaditya, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Hariani Amiruddin, ST	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Putri Aditya, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Azhar Hidayat Yusuf, S.STP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,



REZA FAISAL SALEH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang

Hendaknya rencana awal Renstra ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan ditetapkan dengan peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) Tahun kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (good Governance). Semoga Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah.

Akhirnya pada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih beriring harapan semoga apa yang telah kita kerjakan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta dirahmati Allah SWT.

Makassar, November 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov.
Sulsel



A. Winarno Eka Putra. S.STP., M.H

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19870306 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	
II	
DAFTAR TABER.....	
IV	
DAFTAR GAMBAR.....	
VI	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	2
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
d. Kelompok Sasaran Pelayanan	59
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	60
2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI	
a. Permasalahan Pembangunan Daerah	60
b. Isu Strategis Daerah	63
BAB III	
1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPENDA	69

2. STRATEGI RENSTRA BAPENDA	71
3. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPENDA	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB V PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 2	Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan	15
Tabel 3	Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon	16
Tabel 4	Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	17
Tabel 5	Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Menurut Pelatihan Struktural	18
Tabel 6	Komposisi Non ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Tugasnya	19
Tabel 7	Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	20
Tabel 8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024	46
Tabel 9	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	51
Tabel 2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategi PD	68
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	70
Tabel 3.4	Penahapan Renstra PD	72
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	73

Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	79
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	88
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	101
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama	101
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPD dan Renstra Serta Tahapan Penyusunan Renstra OPD	2
Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	12
Gambar 2	Struktur Organisasi UPT Wilayah	13
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	69
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	70
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	75

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan akan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan lingkungan strategis, baik dari sisi kebijakan fiskal nasional, pertumbuhan ekonomi daerah, maupun perkembangan teknologi informasi, menuntut Bapenda untuk beradaptasi secara responsif dan inovatif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang berkelanjutan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda selama lima tahun ke depan.

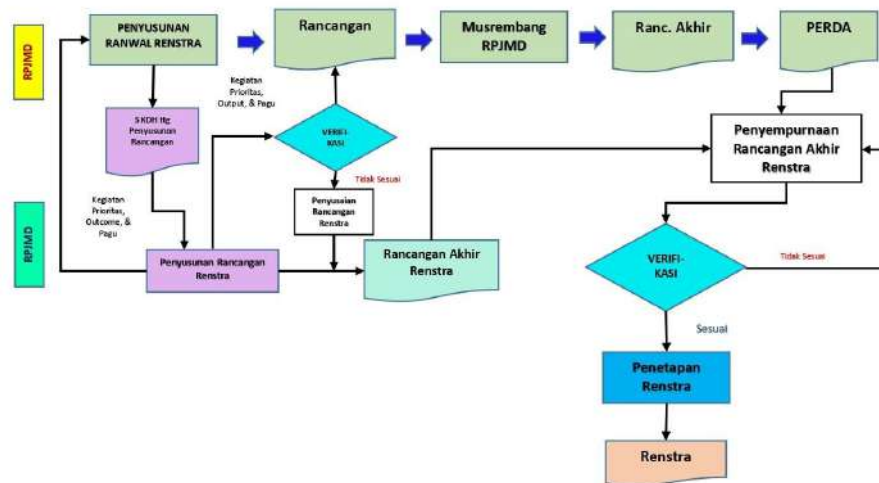
Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen ini juga disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

Secara strategis, Renstra Bapenda memiliki nilai penting sebagai instrumen perencanaan yang memastikan seluruh program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, serta alat kontrol dan evaluasi kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjalankan peran strategisnya secara lebih terarah, dan efektif dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah demi mendukung Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dan Renstra serta Tahapan Penyusunan Renstra OPD



2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, ta,bahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan

- daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanaa Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknia Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 221 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri;
19. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi sulawesi Selatan Nomor 9 Taun 2011 tentang retribusi jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2970;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010
32. tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Nomor 44);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90);

39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045
41. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang sistematis, terarah, dan terukur bagi Bapenda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini berfungsi untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah di bidang pendapatan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah strategis bagi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan daerah, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

3. Meningkatkan sinergi dan konsistensi perencanaan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan perangkat daerah, guna memastikan keselarasan arah pembangunan.
4. Menyediakan instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja, melalui indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis yang dapat diukur secara periodik.
5. Memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan program kerja Bapenda, sehingga mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan program.

4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PD

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, Kelompok sasaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renstra PD, strategi renstra PD dan arah kebijakan renstra PD.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN

BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang uraian Program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

Serta menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama PD, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

3. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan berbagai fungsi, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan teknis pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan tugas pengelolaan pendapatan daerah di unit pelaksana dan daerah kabupaten/kota terkait.
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi pendapatan daerah agar tercapai target dan sesuai dengan regulasi.
5. Inovasi dan pengembangan system termasuk teknologi dan system informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan kepatuhan pajak.

5. Struktur Perangkat Daerah

Bapenda dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Berikut organisasi strukturalnya beserta bagian penting:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab atas keseluruhan tugas dan fungsi Bapenda. Menyusun kebijakan teknis, strategi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretaris Badan

Membantu Kepala Badan dalam urusan administrasi dan teknis; perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan barang inventaris, kearsipan, kehumasan, dll. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari : Sub-bagian Program, Sub-bagian Umum, Sub-bagian Keuangan.

3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menangani penyusunan target, perencanaan pajak/ penerimaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah membawahi pejabat yang terdiri dari : Sub-bidang Perencanaan Pendapatan Daerah , Sub-bidang Peraturan Pendapatan Daerah

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai tugas menangani pajak Provinsi yang menjadi kewenangan, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) membawahi pejabat yang terdiri dari : Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah I, Sub-bidang Pendapatan Asli Daerah II.

5. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi yang mempunyai tugas untuk mendukung digitalisi, sistem informasi untuk pajak/ pungutan, pengelolaan data, integrasi sistem pembayaran, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak, Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, terdiri dari : Sub-bidang Data Dan Informasi meliputi pengolahan data elektronik, penyajian informasi dan pengelolaan *website* Badan, Sub-bidang Verifikasi Dan Validasi Objek Dan Subjek Pajak.

6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan internal, pembinaan terhadap unit pelaksana, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari: Sub-bidang Pengawasan, Sub-bidang Penegakan Hukum Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

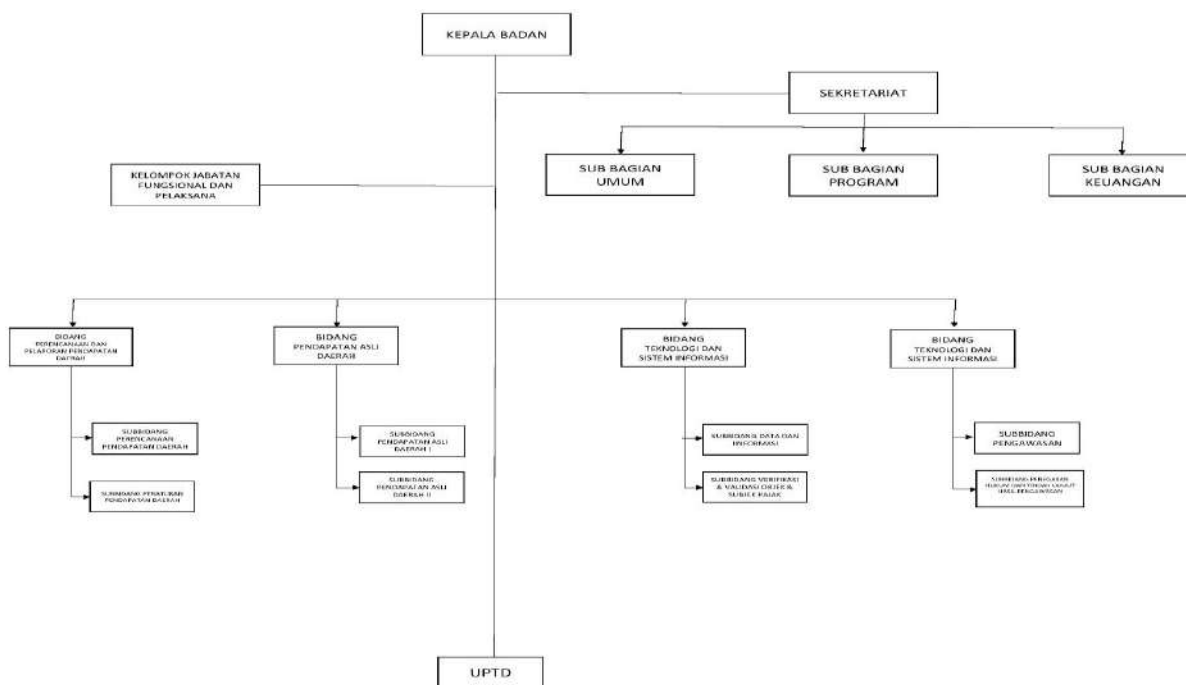
7. Unit Pelaksanaan Teknis/ Samsat

Untuk operasional teknis pelayanan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, registrasi

kendaraan dan layanan-samsat lainnya yang terkait yang di pimpin oleh Kepala UPT Pendapatan Wilayah yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Unit pelayanan teknis terdiri dari: Sub-bagian Tata Usaha, Seksi Penetapan dan Penerimaan, Seksi Pendataan dan Penagihan.

Berikut ini adalah Gambaran Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

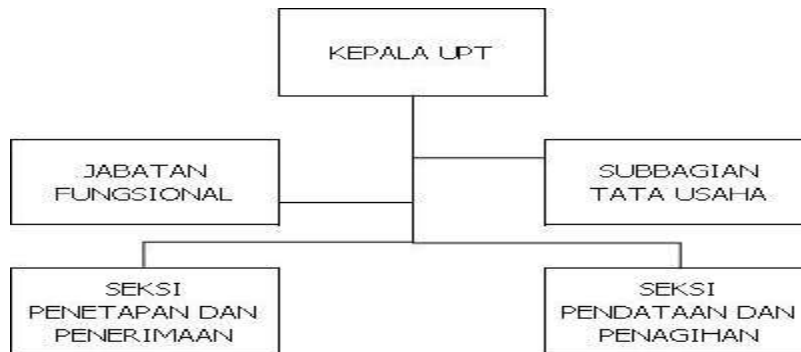
Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur No. 99 Tahun 2016

Gambar 2

Struktur Organisasi UPT Wilayah



Sumber : Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

1. Sumber daya Manusia

Tabel 1

**Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT BADAN	31	22	53
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	6	9	15
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	8	9	17
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	10	9	19
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	13	5	18
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	8	5	13
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	8	2	10
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	8	6	14
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	6	8	14
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	11	1	12
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	9	4	13
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	14	13	27
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	11	3	14
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	8	0	8

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	3	9	12
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	26	20	46
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	15	17	32
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	10	9	19
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	9	6	15
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	8	8	16
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	12	6	18
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	9	8	17
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	6	4	10
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	6	7	13
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	13	3	16
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	7	6	13
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	14	4	18
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	8	2	10
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	5	6	11
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	8	7	15
TOTAL		310	218	528

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 528 orang ASN dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 310 orang (58.7%) adalah laki-laki dan 218 orang (41.3%) adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai di Bapenda mengalami ketidakseimbangan gender, dimana jumlah pegawai laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada kesetaraan, tetapi juga berpengaruh terhadap efektifitas Bapenda dalam memahami dan memenuhi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 122 orang ASN (23,1%) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan bekerja pada Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya sejumlah 406 orang (76,9%) merupakan pegawai UPT yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sudah merata, sedangkan pada UPT disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Tabel 2
Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT BADAN	0	4	43	6
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	12	3
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	1	13	3
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	3	2	10	7
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	0	3	12	3
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	0	2	9	2
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	0	0	7	3
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	0	0	11	3
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	0	0	14	0
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	0	2	8	2
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	0	1	10	2
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	0	5	18	4
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	0	0	6	8
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	0	0	5	3
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	0	1	9	2
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	0	6	27	13
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	0	1	26	5
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	0	2	14	3
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	0	1	9	5
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	0	1	11	4
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	0	4	11	3
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	0	3	12	2
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	0	3	5	2
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	0	2	9	2
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	0	0	14	2
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	0	1	12	1
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	0	2	14	2
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	0	1	7	2
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	0	2	7	2
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	0	1	10	4
TOTAL		0	49	375	104

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah Golongan III dan IV, yaitu 479 orang atau 90,9%, sedangkan Golongan I dan II hanya sejumlah 49 orang atau 9,1%. Kondisi ini mengakibatkan

adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III dan Golongan IV.

Tabel 3
Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	SEKRETARIAT BADAN	1	1	2
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	2
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	-	1	2
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	-	1	3
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	-	1	3
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	-	1	3
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	-	-	3
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	-	1	2
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	-	1	3
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	-	1	3
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	-	1	3
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	-	1	1
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	-	1	3
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	-	1	3
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	-	1	3
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	-	1	3
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	-	1	3
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	-	1	3
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	-	1	3
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	-	1	3
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	-	1	3
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	-	1	3
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	-	1	3
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	-	1	3
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	-	1	3
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	-	1	3
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	-	1	3
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	-	1	3
TOTAL		0	28	82

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Mei Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 110 jabatan sedangkan jabatan yang terisi hanya 103 di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT.

Dari jumlah tersebut 15 jabatan ada pada kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya ada di seluruh UPT.

Tabel 4
Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	SEKRETARIAT BADAN	17	28	1	6	1
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	7	7	-	-	1
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	6	10	1	1	-
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	5	8	2	3	-
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	3	9	1	3	-
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	5	4	-	4	-
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	4	6	-	-	-
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	4	10	-	-	-
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	1	12	1	-	-
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	1	8	1	2	-
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	2	9	-	2	-
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	5	17	1	4	-
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	7	7	-	-	-
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	3	2	1	2	-
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	1	9	1	1	-
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	15	23	2	6	-
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	9	22	-	1	-
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	6	11	-	2	-
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	5	9	-	1	-
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	5	9	-	2	-
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	8	5	1	4	-
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	5	7	1	4	-
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	4	3	-	3	-
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	3	7	-	3	-
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	3	12	-	1	-
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	1	10	1	1	-
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	3	13	1	1	-
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	3	6	-	1	-
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	4	4	1	2	-
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	5	8	1	1	-
TOTAL		159	291	17	59	2

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Mei Tahun 2025.

Berdasarkan table diatas, dapat terlihat lebih banyak pegawai yang menyelesaikan Strata Pendidikannya di jenjang S1 dan S2, sebanyak 450 Orang atau 85,2%.

Tabel 5
Komposisi ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Pelatihan Struktural

NO	UNIT KERJA	PELATIHAN		
		Diklat Pim II	Diklat Pim III	Diklat Pim IV
1.	SEKRETARIAT BADAN	-	1	3
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	1	2
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	-	1	2
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	-	-	1
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	-	1	3
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	-	-	2
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	-	1	2
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	-	1	2
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	-	1	3
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	-	1	2
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	-	1	2
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	-	1	3
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	-	1	3
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	-	-	2
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	-	1	3
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	-	1	3
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	-	1	3
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	-	1	2
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	-	1	3
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	-	-	3
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	-	1	3
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	-	1	1
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	-	1	3
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	-	1	3
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	-	1	3
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	-	1	3
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	-	1	3
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	-	1	2
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	-	1	2
TOTAL		0	26	74

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Mei Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel diatas, Pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV lebih banyak dibanding Jumlah Jabatan Eselon IV ini dikarenakan masih ada pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural namun masih di Jabatan Pelaksana. Dan Diklat Pim III untuk Kepala UPT dan Kepala Bidang sementara dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 6
Komposisi Non ASN Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Tugasnya

No.	UNIT KERJA	Tugas		
		Administrasi	Pengemudi	Pramu Kebersihan
1.	SEKRETARIAT BADAN	24	17	10
2.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH	3	-	-
3.	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	3	-	-
4.	BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	3	-	-
5.	BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	9	-	-
6.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BANTAENG	4	1	1
7.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BARRU	-	1	2
8.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BELOPA	2	1	1
9.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE	9	7	11
10.	UPT PENDAPATAN WILAYAH BULUKUMBA	1	1	3
11.	UPT PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG	2	3	-
12.	UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA	5	7	10
13.	UPT PENDAPATAN WILAYAH JENEPONTO	1	1	2
14.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR	2	-	1
15.	UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA	3	-	1
16.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR I (SELATAN)	17	14	9
17.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II (UTARA)	13	8	5
18.	UPT PENDAPATAN WILAYAH MAROS	1	2	2
19.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO	1	2	1
20.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PANGKEP	1	2	3
21.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PARE-PARE	1	2	2
22.	UPT PENDAPATAN WILAYAH PINRANG	3	1	1
23.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR	2	1	1
24.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SIDRAP	2	-	4
25.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SINJAI	2	1	1
26.	UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG	3	-	1
27.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR	3	-	1
28.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA	2	1	1

No.	UNIT KERJA	Tugas		
		Administrasi	Pengemudi	Pramu Kebersihan
29.	UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA	3	-	1
30.	UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO	2	1	-
TOTAL		127	74	75

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus Tahun 2023.

Berdasarkan table diatas, terdapat 276 Tenaga Non PNS di Badan Pendapatan Daerah, dimana 54% berada pada Jabatan Outsourcing (Pengemudi dan Pramu Kebersihan) sedangkan 46% di Tenaga Non ASN administrasi.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 7
Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	22	3	-		
2	A.C. Split	294	176	59	59	
3	Air Cleaner	11	7	2	2	
4	Alat Detektor Uang Palsu	5	3	1	1	
6	Alat Kantor Lainnya	248	192	41	15	
7	Alat Komunikasi Lainnya	33	25	-	8	
8	Alat Pemadam/Portable	219	161	58		
9	Alat Pembersih lainnya	2	2	-		
10	Alat Penghancur Kertas	2	1	1	-	
11	Alat Rumah Tangga Lainnya	46	3	43		
12	Alat Rumah Tangga Lainnya/Senter	4	-	4		
13	Alat ukur Air Aki	1	1	-	-	
14	Amplifier	20	3	1	16	
15	Audio Filter	9	1	-	8	
	Audio Mixing Console	1	1	-	-	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
16	Audio Tape Reel Recorder	4	3	1		
17	Bangku Tunggu	81	49	16	16	
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	67	61	-	6	
19	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	175	175	-		
20	Battery Charge	3	3	-		
21	Brandkas	2	1	1	-	
22	Buffet Kayu	1	1	-		
23	Camera Electronic	2	2	-		
24	Camera Film	5	2	3		
25	CCTV - Camera Control Television System	31	19	6	6	
	Coffee Maker	1	1	-	-	
26	CPU (Peralatan Personal Komputer)	56	2	48	6	
	Digital LED Running Text	1	1	-	-	
27	Dispenser	18	11	4	3	
28	Display	250	1	9	240	
29	Exhaust Fan	4	2	1	1	
	External	1	1	-	-	
30	External/ Portable Hardisk	51	31	10	10	
31	Facsimile	44	37	-	7	
32	Filing Cabinet Besi	19	11	4	4	
33	Filing Cabinet Kayu	14	-	13	1	
34	Fire Alarm System	1	1	-		
35	Focusing Screen/Layar LCD Projector	17	1	-	16	
36	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	4	-		
37	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	29	29	-		
38	Gordyn/Kray	2	1	1	-	
39	Handy Talky (HT)	120	72	24	24	
40	Hard Disk	20	12	4	4	
41	Harian	2	-	2		
42	Hub	15	6	-	9	
43	Ilmu Pengetahuan umum	42	1	-	41	
44	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	2	2	-		
45	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	7	7	-		
46	Instalasi PLTA Kapasitas Kecil	37	34	3		
47	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	1	1	-		
48	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	13	13	-		
49	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	8	2	-	6	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
50	Internet	1	-	1		
51	Jalan Khusus Perorangan	3	3	-		
52	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	1	1	-		
53	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	5	4	-	1	
54	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	4	3	-	1	
55	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	1	-		
56	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	3	3	-		
57	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	48	1	-	47	
58	Jeep	1	1	-		
59	Kaca Hias	177	1	-	176	
60	Kajian / Kajian Penyusunan Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Prov. Sulsel tentang pajak dan retribusi daerah	6	1	-	5	
61	Kamera Stile	5	3	1	1	
62	Karpet	14	1	-	13	
63	Kasur/Spring Bed	17	4	-	13	
64	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	29	2	27		
65	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	4	-	4		
66	Kipas Angin	5	3	1	1	
67	Kursi Besi/Metal	56	48	-	8	
68	Kursi Biasa	5	-	5		
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	30	18	6	6	
71	Kursi Kayu	2	2	-		
72	Kursi Kerja	316	190	63	63	
73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	17	-		
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-	
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	90	64	26		
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	12	4	4	
77	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	9	9	-		
78	Kursi Lipat	37	23	7	7	
79	Kursi Putar	86	52	17	17	
80	Kursi Rapat	241	128	43	43	
81	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	9	2	-	7	
82	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	30	16	-	14	
83	Kursi Tamu	1	1	-	-	
84	Lambang Instansi	8	-	1	7	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
85	Lampu	8	-	6	2	
86	Lap Top	83	50	17	16	
87	LCD Monitor	16	10	3	3	
88	LCD Projector/Infocus	49	29	10	10	
89	Lemari Besi/Metal	84	50	17	17	
90	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	-	1		
91	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	-	-	1	
92	Lemari Buku untuk Perpustakaan	18	2	16		
93	Lemari Es	9	5	2	2	
94	Lemari Kaca	1	-	1		
95	Lemari kayu	16	10	3	3	
96	Lemari Makan	7	1	-	6	
97	Lensa Kamera	1	1	-	-	
98	Local Area Network (LAN)	1	1	-		
99	Loudspeaker	47	40	7		
	Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service)	2	2	0	0	
100	Mainframe (Komputer Jaringan)	2	1	-	1	
101	Meja Biro	57	34	-	23	
102	Meja Bundar	49	1	-	48	
103	Meja Kerja Kayu	64	38	13	13	
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	109	65	22	22	
105	Meja Kerja Pejabat Eselon III	37	23	7	7	
106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	19	11	4	4	
107	Meja Kerja Pejabat Lainnya	18	11	4	3	
108	Meja Komputer	36	23	13		
109	Meja Makan Besi	145	1	-	144	
110	Meja Panjang	5	-	1	4	
111	Meja Rapat	9	5	2	2	
112	Meja Rapat Pejabat Eselon II	20	2	-	18	
113	Meja Rapat Pejabat Eselon III	23	2	-	21	
114	Meja Resepsionis	2	2	-		
115	Meja Tambahan	25	3	1	21	
116	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	-		
117	Meja Telepon	1	1	-		
118	Mesin Absensi	19	11	4	4	
	Mesin Antrian	2	1	1	-	
119	Mesin Fotocopy Double Folio	11	2	-	9	
120	Mesin Fotocopy Lainnya	2	1	1	-	
121	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	10	6	2	2	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
122	Mesin Hitung Listrik	101	94	6	1	
123	Mesin Hitung Manual	33	22	11		
124	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	3	3	-		
125	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	8	-	8		
126	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	23	13	10		
127	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	62	15	16	31	
128	Mesin Kompresor	1	1	-	-	
129	Mesin Pemotong Rumput	4	2	1	1	
130	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	1	1	-	
131	Mesin Penghitung Uang	10	6	2	2	
132	Mesin Porporasi	7	2	5		
133	Microphone Connector Box	2	2	-		
134	Microphone/Wireless Mic	10	6	2	2	
135	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	27	1	-	26	
136	Mini Komputer	7	5	1	1	
137	Modem	35	21	7	7	
138	Monitor	55	33	11	11	
139	Note Book	74	44	15	15	
140	P.C Unit	384	230	77	77	
142	Pagar Semi Permanen	2	2	-		
143	Papan Nama Instansi	1	1	-		
144	Papan Pengumuman	1	1	-	-	
	Papan Visual/Papan Nama	3	2	1	-	
145	Pattem Generator	21	5	-	16	
146	Pengadaan Software Tea Viewer (lisensi) (TSI)	1	1	-		
147	Peralatan Jaringan	3	2	1	-	
148	Peralatan Mini Komputer Lainnya	4	4	-		
149	Peralatan Personal Komputer Lainnya	10	10	-		
150	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	1	1	-		
151	Perangkat Lunak Sistem Operasi	48	48	-		
152	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1	1	-		
153	Personal Komputer Lainnya	27	4	23		
154	Pintu Gerbang	1	1	-		
	Pompa Air	10	6	2	2	
155	Pompa Air Rumah Tangga	1	1	-	-	
156	Portable Generating Set	3	2	1	-	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	93	56	19	18	
157	Professional Sound System	1	1	-	-	



No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
158	Rak Besi	1	1	-	-	
159	Rak Kayu	399	159	240		
160	Rak Televisi	25	25	-		
161	Router	12	11	1		
162	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	4	1	-	3	
163	Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat	1	1	-		
164	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	1	-		
165	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	1	1	-		
166	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	39	23	8	8	
167	Sepeda Motor	135	59	76		
168	Serial Printer	422	254	84	84	
169	Server	31	19	6	6	
170	Sofa	59	35	12	12	
171	Software / Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile	1	1	-		
172	Software / Aplikasi Sistem Informasi Analisa Penerimaan Pendapatan	1	1	-		
173	Sound System	1	1	-	-	
174	Stabilisator	2	-	2		
175	Station Wagon	76	62	14		
176	Tablet PC	81	49	16	16	
177	Tanah Bangunan Gedung	11	11	-		
178	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	8	-		
179	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	1	-		
180	Tangga	3	3	-		
181	Tangga Aluminium	1	1	-	-	
182	Telephone Hybrid	1	1	-		
183	Televisi	68	42	14	14	
184	Tempat Tidur Kayu	3	1	-	2	
185	Teralis	1	1	-	-	
186	Test Generator	1	1	-		
187	Tiang Bendera	6	-	6		
188	Transformator	2	2	-	-	
189	Tripod Camera	1	1	-		
190	Unit Power Supply	191	115	38	38	
	Vertikal abalind	50	30	10	10	
191	Video Conference	1	1	-	-	
192	Video Equalizer Amplifier	1	1	-		
	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi	10	6	2	2	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
193	White Board	9	9	-		
194	Wireless Access Point	6	6	-		
195	Wireless Amplifier	1	1	-	-	
	TOTAL	14.312	12.299	2.013	1.922	

Sumber: Sekretariat Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Juli Tahun 2025.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan maupun yang ada di seluruh Kantor UPT Pendapatan se Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 14.312 asset di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, 12.299 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 85,93% Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 2.013 atau sebesar 14,07%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 1.922 dengan persentase 13,43%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan kinerja pelayanan yang semakin adaptif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Hal ini ditandai dengan penerapan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, seperti sistem pembayaran pajak daring (online), integrasi layanan e-Samsat, dan penguatan kanal komunikasi digital dengan wajib pajak.

Peningkatan kualitas pelayanan juga tercermin dari membaiknya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kemudahan layanan, serta meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik terus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, simplifikasi proses pelayanan, dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi, peningkatan pendapatan juga dapat menggambarkan bagaimana Bapenda mampu

menghadirkan ataupun mengembangkan inovasi-inovasi kepada wajib Pajak agar memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial, seiring perkembangan teknologi pada tahun 2010 Samsat Online diluncurkan oleh Bapenda untuk pengesahan tahunan dimana sebelumnya untuk melakukan pembayaran pengesahan tahunan harus dilakukan disamsat awal kendaraan terdaftar, namun sejak adanya Samsat Online ini pembayaran pajak tahunan bisa dilakukan dimana saja selama masih di dalam wilayah Sulsel. Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2024 yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data	Ket
2020	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah 2. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	42.43% 75%	41.54% 76.63%	97.90% 102.17%	Bidang Perencanaan Bapenda Prov Sulsel UPTP Wil. Bapenda Prov Sulsel	
2021	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	42.64% 80	44.65% 79.26	104.71% 99.07	Bidang Perencanaan Bapenda Prov Sulsel UPTP Wil. Bapenda Prov Sulsel	
2022	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	42.30% 85	54.10% 79.98	127.90% 94.09	Bidang Perencanaan Bapenda Prov Sulsel UPTP Wil. Bapenda Prov Sulsel	
2023	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	43.24% 90	54.54% 83.616	126.13% 92.91	Bidang Perencanaan Bapenda Prov Sulsel UPTP Wil. Bapenda Prov Sulsel	
2024	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	5.35% 83	5.06% 84.257	94.58% 101.51	Bidang Perencanaan Bapenda Prov Sulsel UPTP Wil. Bapenda Prov Sulsel	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dicapai, khususnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada sasaran meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator kinerja utama kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat melebihi target sampai dengan capaian 126.13%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan jumlah objek pajak, jumlah wajib pajak, serta seberapa besar tunggakan dimasa lalu. Dengan demikian pencapaian sasaran Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekedar berapa besar PAD yang diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan, tetapi berapa besar PAD yang diperoleh dibandingkan dengan potensi yang ada serta seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Adapun hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2020-2024) antara lain sebagai berikut :

1. **GOPAY₂₀₂₀**

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan melalui Aplikasi Gojek dan tentunya setelah wajib pajak mengisi saldo yang cukup dengan menu pilihan Gotagihan kemudian pilih PKB

2. **TOKOPEDIA₂₀₂₁**

Layanan pembayaran tersebut memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dengan cara memilih E_samsat cukup dengan memasukkan Nomor plat kendaraannya dan secara otomatis tertera tagihan pembayaran tersebut.

3. **QRIS₂₀₂₂**

Inovasi pembayaran non tunai baru ini diluncurkan dalam yaitu QRIS, pembayaran menggunakan system barcode QR. Dimana QRIS ini akan dipasang dimasing-masing kasir kantor

samsat stasione, sehingga wajib pajak hanya akan melakukan scan barcode yang disediakan namun dengan catatan harus memiliki mobile banking di bank nasional maupun bank swasta nasional.

4. SAMSAT LADIES²⁰²¹

merupakan inovasi Bapenda Sulsel yang melibatkan mitra Ditlantas Polda Sulsel, dan Jasa Raharja Sulsel yang menugaskan aparat perempuan sebagai petugas yang melayani langsung wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan lebih ramah, lebih sopan, lebih taat administrasi, lebih rapi dalam pengarsipan, dan lebih professional.

5. BAPENDA SULSEL MOBILE²⁰²²

Aplikasi Digital Resmi dari Bapenda Prov. Sulsel yang menyajikan Pelayanan Digital berupa informasi pajak kendaraan, lokasi layanan pajak kendaraan, pendaftaran E_samsat yang dilakukan oleh masyarakat, Bapenda Sulsel Mobile telah dapat di download di Google Play Store.

6. PADAIDI MOBILE²⁰²²

Aplikasi ini khusus untuk pegawai Bapenda Prov.Sulsel. Aplikasi ini rebranding dari SIPADA MOBILE adanya Pembaharuan Aplikasi dan penambahan fitur-fitur yang Memudahkan pegawai Bapenda untuk melakukan Door to Door dan pengaduan, kritik dan saran Masyarakat wajib pajak, Penagihan Pajak dan Pengecekan Pajak By Nama.

Melalui berbagai upaya tersebut diatas, Perkembangan kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan kinerja yang semakin membaik yang dengan ditandai Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2020 – 2024 dari sisi realisasi pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari Rp. 9.365.471.515.325 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 9.993.473.327.773,61 pada Tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,64%. Rata-rata pertumbuhan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 9
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

JENIS PENERIMAAN	TAGET					REALISASI					RASIO					RATA PERT.	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TA	REAL
PENDAPATAN DAERAH	9,826,007,595,860.00	10,381,595,217,978.00	9,494,627,304,164.00	10,156,734,331,527.00	10,163,521,219,616.00	9,365,471,515,325.67	10,009,403,475,558.40	8,992,799,689,251.16	9,529,048,625,670.16	9,938,915,264,282.62	95.31	96.41	94.71	93.82	97.79	0.01	0.01
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,123,032,702,064.00	4,702,759,002,582.00	5,153,507,054,141.00	5,751,863,972,794.00	5,518,369,163,616.00	3,890,209,264,433.67	4,469,113,381,188.42	4,865,959,663,141.11	5,183,909,557,070.16	5,321,578,438,793.62	94.35	95.03	94.42	90.13	96.43	0.08	0.08
PAJAK DAERAH	3,478,330,106,000.00	4,092,615,802,783.00	4,415,955,704,325.00	4,956,099,690,090.00	5,001,794,929,789.00	3,362,622,269,609.30	3,846,736,206,985.26	4,304,408,133,491.08	4,643,444,800,691.78	4,771,037,065,675.56	96.67	93.99	97.47	93.69	95.39	0.10	0.09
Pajak Kendaraan Bermotor	1,251,634,287,000.00	1,506,501,997,000.00	1,449,550,108,000.00	1,624,960,833,000.00	1,739,279,687,000.00	1,294,202,455,768.00	1,443,367,733,721.00	1,502,530,102,481.00	1,707,513,843,123.00	1,760,991,184,086.00	103.40	95.81	103.65	105.08	101.25	0.09	0.08
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	646,484,311,000.00	939,585,293,000.00	1,001,835,067,000.00	1,104,947,184,000.00	1,093,567,407,000.00	712,120,638,717.00	964,002,920,367.00	1,052,446,901,201.00	1,093,899,241,697.00	1,109,797,736,042.00	110.15	102.60	105.05	99.00	101.48	0.14	0.12
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	575,538,726,000.00	770,905,655,000.00	1,144,619,102,000.00	1,270,386,050,000.00	1,181,680,640,000.00	581,757,844,884.00	677,563,536,881.00	840,577,299,400.00	943,506,434,539.00	942,851,261,588.00	101.08	87.89	73.44	74.27	79.79	0.20	0.13
Pajak Air Permukaan	106,109,899,000.00	120,653,981,000.00	179,510,989,000.00	189,634,502,000.00	220,954,646,000.00	106,790,192,457.30	127,637,725,930.26	184,584,217,577.08	195,868,079,895.78	238,491,045,867.56	100.64	105.79	102.83	103.29	107.94	0.20	0.22
Pajak Rokok	898,562,883,000.00	754,968,876,783.00	640,440,438,325.00	766,171,121,090.00	764,032,798,789.00	667,751,137,783.00	634,164,290,086.00	724,269,612,832.00	702,657,201,437.00	716,149,930,092.00	74.31	84.00	113.09	91.71	93.73	(0.04)	0.02
Pajak Alat Berat					2,279,751,000.00					2,755,908,000.00					120.89	-	-
RETRIBUSI DAERAH	45,656,512,512.00	45,691,488,600.00	49,452,842,400.00	41,235,638,951.00	294,074,730,493.00	36,925,738,354.50	38,393,202,133.68	44,123,665,319.20	43,691,813,727.78	302,547,524,859.00	80.88	84.03	89.22	105.96	102.88	0.59	0.69
Retribusi Jasa Umum	18,664,080,000.00	19,799,500,000.00	18,597,400,000.00	19,364,232,001.00	266,860,253,010.00	14,708,969,600.00	15,752,514,093.00	14,810,935,600.00	20,593,805,603.78	277,033,273,741.00	78.81	79.56	79.64	106.35	103.81	0.94	1.08
Retribusi Jasa Usaha	25,092,432,512.00	24,005,668,600.00	28,855,442,400.00	20,721,406,950.00	27,114,477,483.00	20,959,185,154.50	21,406,835,830.68	28,037,985,719.20	21,745,621,874.00	25,401,863,918.00	83.53	89.17	97.17	104.94	93.68	0.02	0.05
Retribusi Perizinan Tertentu	1,900,000,000.00	1,886,320,000.00	2,000,000,000.00	1,150,000,000.00	100,000,000.00	1,257,583,600.00	1,233,852,210.00	1,274,744,000.00	1,352,386,250.00	112,387,200.00	66.19	65.41	63.74	117.60	112.39	(0.52)	(0.45)
HASIL PENG. KEK. DAERAH YANG DIPISAHKAN	115,572,484,304.00	115,551,932,611.00	136,116,485,452.00	134,603,389,662.00	135,911,003,734.00	115,022,553,678.00	115,551,932,611.00	135,416,485,452.00	134,625,075,430.00	136,080,962,805.00	99.52	100.00	99.49	100.02	100.13	0.04	0.04
Bagian Laba Peny. Modal Perusah. Milik Daerah / BUMD	114,289,147,112.00	114,017,541,955.00	134,054,613,792.00	132,374,016,520.00	133,803,957,739.00	114,159,147,112.00	114,017,541,955.00	133,354,613,792.00	132,374,016,520.00	133,803,987,739.00	99.89	100.00	99.48	100.00	100.00	0.04	0.04
Bagian Laba Peny. Modal Perusah. Milik Negara / BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba Peny. Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1,283,337,192.00	1,534,390,656.00	2,061,871,660.00	2,229,373,142.00	2,107,045,995.00	863,406,566.00	1,534,390,656.00	2,061,871,660.00	2,251,058,910.00	2,276,975,066.00	67.28	100.00	100.00	100.97	108.06	0.13	0.27
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	483,473,599,248.00	448,899,778,588.00	551,982,021,964.00	619,925,254,091.00	86,588,499,600.00	375,638,702,791.87	468,432,039,458.48	382,011,378,878.83	362,147,867,220.60	111,912,885,454.06	77.70	104.35	69.21	58.42	129.25	(0.35)	(0.26)
Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	310,000,000.00	416,547,794.00	618,417,000.00	30,239,570,000.00	1,746,194,000.00	1,527,608,500.00	354,272,694.00	624,598,255.00	2,628,173,267.00	2,214,147,200.00	492.78	85.05	101.00	8.69	126.80	0.54	0.10
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	6,700,000,000.00	1,991,286,000.00	3,739,872,800.00	2,703,801,700.00	-	6,611,600,000.00	1,357,100,000.00	3,017,095,000.00	2,141,536,500.00	-	98.68	68.15	80.67	79.20	-	-

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



JENIS PENERIMAAN	TAKET					REALISASI					RASIO					RATA PERT.	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TA	REAL
Jasa Giro	50,700,000,000.00	23,414,616,780.00	23,472,989,862.00	25,740,490,388.00	12,710,701,962.00	23,414,616,780.00	22,901,380,458.00	25,740,490,388.51	15,918,516,871.15	11,343,225,269.73	46.18	97.81	109.66	61.84	89.24	(0.29)	(0.17)
Hasil Kerja Sama Daerah	275,000,000.00	750,000,000.00	1,455,000,000.00	1,455,000,000.00	4,130,042,000.00	128,334,360.00	704,727,747.00	1,319,960,791.00	1,988,122,153.00	3,553,663,761.00	46.67	93.96	90.72	136.64	86.04	0.97	1.29
Pendapatan Bunga	-	-	-	589,040,281.00	-	-	-	-	797,681,732.00	813,296,016.00	-	-	-	135.42	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	51,862,830,599.00	-	54,178,909,512.00	10,200,000.00	2,593,805,252.10	32,652,550,158.47	3,821,166,601.45	11,775,183,240.03	5,430,501,134.56	3,830,721,372.10	62.96	-	21.73	53240.21	147.69	(0.53)	(0.41)
Pend. Denda Atas Keterlamb. Pelak. Pekerjaan	400,000,000.00	19,215,971,922.00	16,032,810,149.00	4,693,652,775.00	4,843,660,709.80	1,762,116,185.00	9,493,905,195.56	8,958,087,236.98	9,783,038,075.36	14,725,288,599.15	440.53	49.41	55.87	208.43	304.01	0.87	0.70
Pendapatan Denda Pajak	87,018,151,370.00	134,064,783,058.00	208,712,589,000.00	306,172,480,692.00	47,726,658,000.00	29,146,059,677.00	36,814,278,998.00	79,710,867,273.00	65,947,996,938.00	50,165,162,290.00	33.49	27.46	38.19	21.54	105.11	(0.14)	0.15
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	393,984.00	3,439,100.00	28,614,953.00	35,946,974.00	2,818,796.00	30,227,208.00	4,112,908.00	2,596,523.00	-	-	7672.19	119.59	9.07	-	(0.48)
Pendapatan dari Pengembalian	4,150,000,000.00	1,686,808,564.00	5,034,562,500.00	1,299,341,697.00	422,294,028.00	1,579,959,522.00	1,294,374,433.00	2,725,744,664.00	1,595,970,519.00	1,396,775,708.72	38.07	76.74	54.14	122.83	330.76	(0.44)	(0.03)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	-	29,428,384,606.00	9,682,726,995.10	-	-	-	27,316,915,234.46	10,148,371,261.09	-	-	-	92.83	104.81	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	550,000,000.00	3,304,688,514.00	10,530,845,001.00	-	-	1,773,427,353.40	5,129,339,051.32	4,668,221,454.81	-	-	322.44	155.21	44.33	-	-	-	-
Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	288,205,117,279.00	259,346,361,956.00	229,954,218,956.00	216,553,781,752.00	-	283,618,083,282.00	381,304,175,484.15	245,100,898,367.50	227,719,743,388.07	11,578,100,953.27	98.41	147.03	106.59	105.16	-	-	(0.55)
DANA TRANSFER	5,561,256,775,775.00	5,537,962,459,646.00	4,196,566,050,162.00	4,393,247,953,053.00	4,636,167,641,000.00	5,399,732,629,887.00	5,426,146,349,398.00	4,096,755,656,038.00	4,332,408,701,241.00	4,607,573,039,706.00	97.10	97.98	97.62	98.62	99.38	(0.04)	(0.04)
DANA BAGI HASIL	352,285,099,865.00	267,692,010,646.00	336,098,530,162.00	314,133,289,053.00	341,235,150,000.00	272,130,329,571.00	342,218,564,517.00	370,281,320,124.00	300,683,356,808.00	367,792,964,000.00	77.25	127.84	110.17	95.72	107.78	(0.01)	0.08
DANA ALOKASI UMUM	2,357,591,182,000.00	2,339,135,873,000.00	2,340,040,525,000.00	2,525,244,049,000.00	2,712,463,777,000.00	2,349,993,034,000.00	2,339,135,873,000.00	2,340,040,525,000.00	2,528,731,264,500.00	2,666,244,873,049.00	99.68	100.00	100.00	100.14	98.30	0.04	0.03
DANA TRANSFER KHUSUS	2,846,880,493,910.00	2,906,628,743,000.00	1,520,426,995,000.00	1,482,397,871,000.00	1,563,495,550,000.00	2,773,109,266,316.00	2,718,050,528,881.00	1,386,433,810,914.00	1,431,521,335,933.00	1,554,562,038,657.00	97.41	93.51	91.19	96.57	99.43	(0.14)	(0.13)
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	4,500,000,000.00	24,505,833,000.00	-	54,571,497,000.00	-	4,500,000,000.00	24,505,833,000.00	-	54,571,497,000.00	-	100.00	100.00	-	100.00	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-	-	-	-	2,235,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSENTIF FISKAL	-	-	-	16,901,247,000.00	18,973,164,000.00	-	-	-	16,901,247,000.00	18,973,164,000.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141,718,118,021.00	140,873,755,750.00	144,554,199,861.00	11,622,405,680.00	8,984,415,000.00	75,529,621,005.00	114,143,744,972.00	30,084,370,072.05	12,730,367,359.00	9,763,785,783.00	53.30	81.03	20.81	109.53	108.67	(0.50)	(0.40)
Pendapatan Hibah	141,718,118,021.00	140,873,755,750.00	144,554,199,861.00	11,622,405,680.00	8,984,415,000.00	75,529,621,005.00	114,143,744,972.00	30,084,370,072.05	12,730,367,359.00	9,763,785,783.00	53.30	81.03	20.81	109.53	108.67	(0.50)	(0.40)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	-	-	3,453,593,880.00	1,267,655,000.00	-	-	-	3,990,214,198.00	1,826,947,158.00	-	-	-	115.54	144.12	-	-



JENIS PENERIMAAN	TARGET					REALISASI					RASIO					RATA PERT.	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TA	REAL
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	-	-	4,383,811,800.00	4,481,760,000.00	-	-	-	4,383,811,800.00	4,481,760,000.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	3,785,000,000.00	3,235,000,000.00	-	-	-	4,356,341,361.00	3,455,078,625.00				115.09	106.80	-	-

Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah selama periode 2020-2024 secara persentase pertumbuhan mempunyai pembentuk PAD yang berbeda-beda dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,42% dimana persentase Pertumbuhan yang paling tinggi berasal dari Retribusi Daerah sebesar 70,47% sementara pertumbuhan yang paling rendah adalah lain-lain pendapatan yang sah sebesar -26,01%. Sementara Pajak daerah menunjukkan Peningkatan yang cukup besar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,39%. Secara umum persentase realisasi Pendapatan Asli daerah pada tahun 2024 terhadap pendapatan daerah sebesar 53,79% sementara persentase pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 46,11% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah Sulawesi Selatan semakin membaik sehingga pemerintah daerah lebih mandiri dan berinisiatif untuk menggali potensi baru.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait pendapatan pada periode ini adalah dinamika fluktuatif yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang mencerminkan respons fiskal terhadap kondisi nasional, kebijakan sektoral, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 9,36 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang hampir 41,5% dari total pendapatan, dengan dominasi dari Pajak Daerah. Tahun ini menandai awal dampak pandemi COVID-19, namun realisasi PAD tetap menunjukkan angka yang cukup tinggi, sementara Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi penopang utama keuangan daerah.

Tahun 2021 mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi Rp. 10,01 triliun. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi pasca awal pandemi dan adanya tambahan Dana Transfer, termasuk Dana Insentif Daerah serta hibah yang cukup signifikan. Meski pandemi masih berlangsung, adaptasi digitalisasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah menjadi faktor pendorong naiknya PAD.

Pada tahun 2022, pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp.8,99 triliun. Penurunan paling mencolok terjadi pada Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai akibat dari peralihan skema penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang sebelumnya masih disalurkan melalui RKUD Pemerintah Provinsi, mulai pada tahun anggaran 2022 telah disalurkan langsung ke rekening sekolah, sehingga mempengaruhi nilai akumulasi pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD. Meski demikian, PAD tetap tumbuh seiring mulai pulihnya ekonomi dan meningkatnya kesadaran wajib pajak.

Tahun 2023 mencatatkan kenaikan pendapatan menjadi Rp. 9,52 triliun. Kinerja PAD terus membaik, sementara Dana Transfer juga mengalami sedikit pemulihan. Namun, terjadi penurunan tajam pada pos hibah, disebabkan oleh berakhirnya program-program dari

Pemerintah Pusat seperti READSI dan IPDMIP, yang sebelumnya menyumbang cukup besar pada kategori Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Memasuki tahun 2024, total pendapatan kembali naik signifikan menjadi Rp. 9,99 triliun. Pertumbuhan PAD mencapai puncaknya, didorong oleh relaksasi pajak daerah yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pendapatan Transfer juga meningkat, utamanya karena bertambahnya jumlah pegawai PPPK yang secara langsung berpengaruh terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD selama periode ini cukup tinggi, yaitu sebesar 8,42%, jauh melampaui pertumbuhan rata-rata total pendapatan yang hanya 1,64%. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang mulai menurun terhadap dana transfer pusat dan meningkatnya kemandirian fiskal daerah, ditandai dengan kontribusi PAD yang sudah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Transfer dalam APBD.

Berkaitan dengan perkembangan belanja daerah, selama periode 2020-2024 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan belanja daerah tercatat tumbuh positif dengan capaian – 0,21 persen, dimana komponen alokasi belanja daerah yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada komponen belanja Transfer yang rata-rata pertumbuhan mencapai 4,75 persen selama periode 2020-2024.

Dilihat dari struktur belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, nampaknya masih didominasi oleh alokasi belanja operasional. pada tahun 2024, alokasi belanja operasional mencapai 67,50 persen dari Rp 9,8 Trilyun realisasi total belanja daerah, selebihnya untuk belanja modal dialokasikan 13,10 persen, belanja tidak terduga sebesar 0,01 persen dan belanja transfer 19,39 persen. Fakta ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, terlebih lagi jika melihat persentase alokasi belanja modal terhadap realisasi belanja baru mencapai angka 13,10 persen, namun belanja modal ditahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 35,02 persen apabila dibandingkan belanja modal ditahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan penataan prioritas belanja yang cenderung untuk pemenuhan belanja pelayanan publik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri, belanja operasional setiap tahun juga mengalami peningkatan, yang disebabkan meningkatnya proporsi belanja pegawai akibat dari penerimaan CPNS dan PPPK yang menandakan tingginya kebutuhan pegawai, selain itu adanya penambahan alokasi untuk belanja hibah dalam rangka mendukung pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Pada komponen pembiayaan daerah, selama periode 2020-2024 secara rata-rata menunjukkan kecenderungan pembiayaan surplus, dimana pendapatan daerah lebih besar

dibandingkan belanja daerah, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mencatat angka defisit sebesar Rp. 620,617 Milyar dan Rp. 169,031 Milyar. Dengan rata-rata pertumbuhan surplus APBD cenderung mengalami peningkatan, mengindikasikan pengelolaan alokasi belanja yang semakin efektif atau kemampuan meningkatkan pendapatan daerah yang semakin membaik.

Berkaitan dengan pembiayaan defisit, selama periode ini nampaknya pemerintah daerah Sulawesi Selatan telah mengambil langkah kebijakan ekspansif, dengan memperbesar alokasi belanja daerah untuk sektor-sektor ekonomi atau kegiatan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih akseleratif, khususnya dalam mendorong akselerasi kegiatan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercermin dalam realisasi indikator keuangan dan fiskal selama periode tahun 2019 hingga 2023, yang dapat dilihat pada table berikut ini:



**Tabel 10
Target dan Realisasi SDGs Tahun 2019-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	Rp	4,170,721,006,000	4,375,872,214,000	4,914,232,240,000	5,196,694,487,000	5,546,325,533,000	4,138,582,293,061	3,890,209,264,434	3,883,831,555,115	4,865,956,663,141	5,183,882,749,744
Pajak Daerah	Rp	3,711,927,500,000	3,843,460,587,000	4,258,454,850,000	4,423,068,981,000	4,717,384,801,000	3,710,611,599,841	3,362,622,269,609	3,846,736,206,985	4,304,408,133,491	4,643,444,800,692
PDRB	Rp	508,358,804,360,000	559,725,343,140,000	563,970,717,570,000	620,732,588,800,000	746,315,063,610,000	504,322,000,000,000	504,479,000,000,000	545,230,000,000,000	605,144,680,000,000	652,570,000,000,000
Belanja Daerah	Rp	9,952,606,237,000	10,414,124,015,999	12,110,640,284,934	11,749,697,437,966	11,528,900,792,966	9,489,469,127,456	9,978,069,735,608	10,167,278,467,948	8,958,791,076,580	
Belanja Transfer	Rp	1,882,050,336,596	2,162,966,421,460	2,232,551,924,538	2,521,842,500,431	2,777,234,532,888	2,245,408,539,582	2,339,786,201,547	1,725,944,605,605	2,344,263,409,297	
Belanja (tdk termasuk dana transfer dan dana desa)	Rp	8,070,555,900,404	8,251,157,594,539	9,878,088,360,396	9,227,854,937,535	8,751,666,260,078	7,244,060,587,874	7,638,283,534,060	8,441,333,862,343	6,614,527,667,283	-
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	%	46	47	43	48	54	51	44	46	65	-

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, PAD tercatat sebesar Rp4,13 triliun, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp3,89 triliun pada tahun 2020. Setelah sempat kembali naik di tahun 2022 menjadi Rp4,87 triliun, PAD mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar Rp5,18 triliun pada tahun 2023.

Penerimaan dari Pajak Daerah juga mengalami dinamika serupa, yaitu dari Rp3,71 triliun pada tahun 2019 menurun hingga Rp3,36 triliun pada tahun 2020, dan kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp4,64 triliun pada tahun 2023.

Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. PDRB meningkat dari Rp504,32 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp652,57 triliun pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan ekonomi regional yang positif.

Belanja Daerah mengalami peningkatan signifikan, dari Rp9,49 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp10,17 triliun di tahun 2021. Meskipun sempat turun menjadi Rp8,96 triliun pada 2022, belanja daerah kembali meningkat pada 2023 menjadi Rp9,48 triliun.

Belanja Transfer mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp2,34 triliun, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp1,72 triliun.

Belanja yang tidak termasuk dana transfer dan dana desa tercatat tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp8,44 triliun, namun menurun drastis pada tahun 2022 menjadi Rp6,61 triliun. Data untuk tahun 2023 belum tersedia.

Rasio total pendapatan pemerintah terhadap PDRB menurut sumbernya menunjukkan tren menurun dari 0,82% pada tahun 2019 menjadi 0,71% pada tahun 2021, namun mengalami peningkatan kembali menjadi 0,80% pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 0,79% pada 2023.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB relatif stabil di angka 0,71% selama tiga tahun terakhir (2021–2023), setelah mengalami penurunan dari 0,74% pada 2019 menjadi 0,67% pada 2020.

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menunjukkan peningkatan dari 44,02% pada tahun 2020 menjadi 65,08% pada tahun 2022. Namun, proporsi ini menurun drastis menjadi 0,00% pada tahun 2023, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam analisis fiskal.

Memasuki periode perencanaan tahun 2025–2029, Bapenda Sulsel berkomitmen untuk memperkuat kinerja pelayanan publik secara lebih progresif dan inovatif, guna memastikan tercapainya target-target pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan.

d. Kelompok sasaran pelayanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan pada periode perencanaan tahun 2025–2029, penetapan kelompok sasaran pelayanan menjadi salah satu aspek strategis yang mendasari penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Kelompok sasaran pelayanan Bapenda Sulawesi Selatan merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari layanan yang diberikan, serta berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Adapun kelompok sasaran pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Daerah

Kelompok ini mencakup individu maupun badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB);
- Pengguna dan pemanfaat sumber daya air permukaan;
- Pelaku usaha yang menjadi subjek Pajak Rokok;
- Badan usaha milik negara/daerah yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah.

2. Masyarakat Umum

Sebagai penerima manfaat tidak langsung dari pengelolaan pendapatan daerah, masyarakat umum merupakan sasaran strategis dalam upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Pelayanan kepada kelompok ini dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta penyediaan akses informasi perpajakan yang transparan dan akuntabel.

3. Instansi Pemerintah dan Mitra Kerja

Kelompok ini terdiri atas instansi vertikal, perangkat daerah, lembaga penegak hukum, lembaga keuangan/perbankan, dan mitra strategis lainnya yang terlibat dalam kerja sama pelayanan maupun pertukaran data untuk mendukung integrasi sistem perpajakan daerah. Sinergi dengan kelompok ini berperan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendapatan.

4. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sebagai motor penggerak ekonomi daerah, pelaku UMKM menjadi sasaran pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka memperluas basis pajak daerah. Pelayanan kepada kelompok ini diarahkan pada kemudahan akses informasi, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, serta peningkatan partisipasi dalam pembangunan melalui kontribusi pajak.

5. Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Generasi Muda

Dalam upaya membangun budaya sadar pajak sejak dini, kelompok pelajar dan mahasiswa merupakan target dalam program pendidikan perpajakan dan kampanye

publik. Pelayanan terhadap kelompok ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, kompetisi edukatif, serta pemanfaatan media digital untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan generasi muda.

Penetapan kelompok sasaran pelayanan tersebut menjadi dasar dalam perumusan strategi pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, kepuasan masyarakat, serta optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda, khususnya dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan di bidang perpajakan daerah. Adapun mitra kerja Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah se Kabupaten/Kota

Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan menjalin sinergi dengan Bapenda Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah

2. PT. Jasa Raharja

merupakan mitra bapenda berkait dengan pemenuhan asuransi atas kecelakaan dalam aktifitas berkendara

3. Lembaga Kepolisian

Bapenda menjalin sinergi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan daerah terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor berkait kewenangan registrasi dan identifikasi atas kepemilikan kendaraan bermotor

4. Bank Sulselbar

Untuk mendukung kemudahan akses pembayaran serta perluasan kanal layanan, bapenda bekerja sama dengan Lembaga perbankan daerah sebagai mitra utama dalam penerimaan pajak daerah

2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Kondisi Realita / Capaian Saat Ini

- Bapenda Sulsel telah melakukan banyak inovasi pelayanan publik untuk kemudahan wajib pajak / masyarakat, seperti aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, Samsat Lorong, Samsat Sipakainge, Samsat Mobile Banking, gerai/drive thru, samsat keliling, samsat pembantu, minibus dll.
- Realisasi PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor dan beberapa jenis pajak lainnya belum mencapai target. Misalnya: realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat sangat rendah dibanding target.
- Beberapa jenis pajak (seperti pajak rokok, pajak alat berat) terutama jauh di bawah target, yang menunjukkan kepatuhan atau efektivitas pemungutan masih kurang.
- Ada kebijakan baru mulai 5 Januari 2025, yakni penerapan opsen (pungutan tambahan) untuk PKB dan BBNKB, yang mengubah pembagian hasil pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdampak terhadap potensi pendapatan provinsi, serta pungutan pajak dari wajib pajak.
- Kendala kepatuhan wajib pajak: misalnya tunggakan pajak kendaraan di beberapa wilayah sangat tinggi.
- Inovasi-pelayanan meskipun cukup banyak, ada indikasi bahwa belum semua wajib pajak mengaksesnya dengan mudah (misalnya: apakah jangkauan layanan mobile/drive thru/keliling sudah merata di semua kecamatan / desa terpencil). Tidak semua fitur layanan digital mungkin dikenal atau digunakan masyarakat. (Fakta bahwa realisasi pajak tidak mencapai target menandakan ada hambatan akses, kepatuhan, atau efektivitas).
- Tingkat kepuasan pelayanan masyarakat dilaporkan tinggi dalam beberapa survei / penggunaan aplikasi (contoh: aplikasi Bapenda Sulsel Mobile mencapai tingkat kepuasan 100,61% melebihi target 83%).
- Namun ada juga data bahwa beberapa jenis pajak (tax base tertentu) sangat jauh dari target, misalnya pajak alat berat hanya mencapai 0,41% dari target.

2. Kondisi Ideal / Target

- Semua jenis pajak wajib daerah (PKB, BBNKB, PBBKB, PBB-jenis lainnya) mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD / APBD, dengan tingkat realisasi mendekati 100% atau sesuai progres tahunan yang ditetapkan.
- Layanan pajak dan pelayanan publik Bapenda bersifat merata, mudah diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk di daerah terpencil, dengan respon cepat, transparan, dan digitalisasi penuh bila memungkinkan.

- Kepatuhan wajib pajak tinggi: minimal melalui sosialisasi, penagihan, verifikasi data kendaraan, data kependudukan, penerapan sanksi atau insentif, agar tunggakan pajak rendah dan tidak menjadi beban.
- Integrasi KLHS harus menjamin bahwa kebijakan pelayanan pajak dan pemungutan PAD mempertimbangkan dampak lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan, misalnya dalam penggunaan dana pajak, dampak transportasi, penggunaan lahan / infrastruktur yang mungkin ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, dsb.

3. Kesenjangan (Gap) / Realita vs Harapan

Berdasarkan kondisi di atas, terdapat beberapa kesenjangan:

- Realisasi pajak jauh di bawah target pada beberapa jenis: banyak jenis pajak yang belum optimal pemungutannya, menunjukkan kepatuhan atau efektivitas pelayanan / pengawasan masih lemah.
- Meskipun banyak inovasi pelayanan sudah dilakukan, akses ke layanan tersebut belum merata dan mungkin belum optimal diketahui penggunaannya terutama di daerah terpencil atau untuk wajib pajak yang kurang sadar teknologi.
- Adanya perubahan regulasi (opsen dan pembagian hasil pajak) yang dapat mengurangi bagian pendapatan provinsi, jika tidak diikuti peningkatan efektivitas layanan atau kepatuhan wajib pajak, maka target PAD provinsi bisa tidak tercapai.
- Ada tunggakan pajak yang belum terselesaikan / kurangnya upaya penagihan dan pemetakhiran data untuk menekan tunggakan tersebut.
- Layanan digital dan aplikasi cenderung baik, namun tingkat kepuasan tinggi belum sepenuhnya menjamin bahwa semua aspek pelayanan, seperti kemudahan akses offline, kejelasan regulasi, kecepatan proses di samsat/UPT, transparansi, penyuluhan/sosialisasi, sudah memadai.
- Bisa jadi aspek lingkungan belum terintegrasi kuat dalam pelayanan pungutan pajak kendaraan bermotor, misalnya dampak kendaraan bermotor terhadap polusi, penggunaan lahan untuk jalan/infrastruktur, transportasi umum, dsb. (jika KLHS mengharuskan integrasi pembangunan berkelanjutan, mungkin masih ada gap di sini).

4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi di atas, berikut beberapa rumusan permasalahan konkret:

1. Rendahnya realisasi pajak dari beberapa jenis pajak daerah (misalnya pajak alat berat, pajak rokok, PBBKB) dibanding target APBD, yang menunjukkan

bahwa efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan pemutakhiran data belum optimal.

2. Ketidakmerataan akses pelayanan pajak, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang terjangkau, meskipun sudah tersedia berbagai inovasi digital dan mobile.
3. Perubahan regulasi pembagian hasil pajak (penerapan opsen PKB/BBNKB dan pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota) yang berdampak negatif terhadap penerimaan provinsi jika tidak disertai peningkatan kepatuhan dan efisiensi pelayanan.
4. Tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor (dan/atau SKPD terkait) akibat kurangnya mekanisme penagihan efektif, pemutakhiran data kendaraan / kependudukan serta sosialisasi kepada wajib pajak.
5. Ketidaksempurnaan integrasi KLHS dalam perencanaan pelayanan dan pemungutan pajak, misalnya belum jelas bagaimana dampak lingkungan dan aspek pembangunan berkelanjutan diakomodasi dalam kebijakan pemungutan pajak (termasuk pajak kendaraan bermotor) dan bagaimana penggunaan PAD menyumbang terhadap pembangunan ramah lingkungan.
6. Perlu penguatan layanan offline dan kejelasan prosedur administratif, misalnya kejelasan dalam proses cetak/pengesahan STNK/SKDP / SKKP, kecepatan layanan di kantor samsat/UPT, serta kejelasan jumlah biaya tambahan (administrasi, biaya opsen, biaya pengesahan) agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan atau beban tak terduga.

b. Isu Strategis Daerah

Dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan mempercepat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi sejumlah isu strategis di sektor pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel. Isu-isu ini muncul sebagai tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) serta efektivitas pelayanan pajak daerah.

1. Masih Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), masih menjadi persoalan signifikan. Berdasarkan data terkini, terdapat lebih dari 1,6 juta unit

kendaraan di Sulsel yang belum melunasi pajak, dengan potensi penerimaan yang belum ter gali mencapai ratusan miliar rupiah. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran, keterbatasan akses layanan, hingga lemahnya penegakan regulasi.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital dan Inovasi Layanan.

Meski Bapenda Sulsel telah melakukan berbagai inovasi seperti *Bapenda Mobile*, *Samsat Drive Thru*, dan *Samsat Keliling*, implementasi dan pemanfaatan layanan digital tersebut belum merata. Banyak masyarakat, khususnya di daerah pinggiran dan pelosok, belum mengakses layanan ini secara maksimal, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun literasi digital yang rendah.

3. Tingginya Tunggakan Pajak dan Lemahnya Penegakan Hukum.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor dan jenis pajak lainnya menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan penagihan. Belum optimalnya pendataan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU), serta belum tersambung nya basis data antara Bapenda dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Dukcapil, menjadi penghambat dalam pemutakhiran data dan penegakan sanksi administratif.

4. Ketergantungan Terhadap Sumber PAD yang Terbatas.

Struktur PAD Sulsel masih sangat bergantung pada PKB dan BBNKB. Diversifikasi sumber pendapatan belum optimal, khususnya pada jenis-jenis pajak lainnya seperti PBBKB, pajak alat berat, pajak air permukaan, dan retribusi jasa usaha. Ketergantungan ini menjadi risiko fiskal jika terjadi perlambatan ekonomi atau perubahan regulasi yang memengaruhi sektor transportasi.

5. Dampak Perubahan Kebijakan Pusat terhadap Kewenangan dan Bagi Hasil.

Penerapan kebijakan opsen (pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB) yang mulai berlaku pada tahun 2025, berimplikasi pada perubahan struktur penerimaan provinsi. Jika tidak diikuti dengan strategi penyesuaian yang adaptif, kebijakan ini bisa menyebabkan potensi kehilangan pendapatan yang signifikan dari sektor kendaraan bermotor.

6. Belum Meratanya Pemerataan Penerimaan Pajak antar Wilayah.

Distribusi penerimaan pajak masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Makassar, sementara daerah-daerah lain menunjukkan realisasi PAD yang jauh lebih rendah. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan pelayanan dan pengelolaan pendapatan di tingkat UPT/Samsat kabupaten/kota yang perlu ditangani secara sistemik.

7. Keterbatasan SDM dan Kapasitas Organisasi

Masih terdapat tantangan terkait kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun penguasaan teknologi informasi. Untuk mendukung transformasi digital dan penguatan pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak.

Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja pendapatan, tetapi juga secara langsung memengaruhi kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program-program prioritas pembangunan, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa strategi penguatan pendapatan daerah yang progresif dan berkeadilan, tujuan pembangunan jangka menengah akan sulit tercapai secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan sistem pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi lintas sektor menjadi fokus strategis yang harus dimasukkan ke dalam prioritas kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029.

c. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD yang Dapat Dikembangkan Untuk Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

Berikut narasi potensi-daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi kewenangan Bapenda Sulsel, yang masih bisa dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Potensi ini bila dikelola dengan baik bisa mengurangi ketimpangan, meningkatkan penerimaan daerah, serta memperkuat dana untuk pelayanan publik.

1. Potensi Utama yang Sudah Ada

Dari data dan laporan terkini, beberapa potensi nyata Bapenda Sulsel antara lain:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Ada banyak kendaraan yang menunggak pajak—sekitar 1,6 juta unit kendaraan di Sulsel belum melunasi PKB, dengan nilai potensi sekitar

Rp 500-600

miliar.

Selain itu, realisasi PKB dan BBNKB pernah melebihi target pada tahun 2024.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Meski tidak setinggi PKB dari segi kontribusi, PBBKB tetap menjadi bagian penting PAD. Tingkat realisasinya belum selalu optimal

- Pajak Nonkonsumtif & Retribusi Daerah Lain

Banyak jenis pajak nonkonsumtif seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, serta retribusi jasa usaha yang masih bisa dikembangkan lebih optimal.

- Potensi dari digitalisasi layanan & inovasi pelayanan kepada wajib pajak

Misalnya aplikasi *Bapenda Sulsel Mobile*, Samsat digital/mobile/keliling, dan sinergi instalasi layanan offline dan online untuk memperluas akses.

2. Potensi yang Bisa Diperluas / Dikembangkan Lebih Lanjut

Untuk mendukung keadilan dan percepatan kesejahteraan masyarakat, berikut beberapa potensi tambahan yang bisa dikembangkan oleh Bapenda Sulsel:

1. Penagihan Tunggakan Pajak PKB & Entry Data KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang)

- Memanfaatkan data wajib pajak / kendaraan yang belum membayar pajak (tunggakan) dan melakukan kampanye penagihan aktif, termasuk jemput bola atau door to door.
- Melibatkan aparat lokal seperti Bhabinkamtibmas, perangkat desa/kelurahan agar data lebih akurat dan kepatuhan meningkat

2. Peningkatan dan Perluasan Opsen PKB/BBNKB ke Kabupaten/Kota

- Kebijakan opsen (pajak tambahan) apabila dikelola di tingkat daerah (kabupaten/kota) dapat memperbesar porsi PAD lokal. Contoh di Makassar yang memproyeksikan potensi ratusan miliar rupiah dari opsen pajak kendaraan.

3. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha yang Sesuai Peraturan Terbaru

- Revisi Perda Retribusi Jasa Usaha agar objek-objek yang sudah berubah kewenangan atau operasi bisa dipungut retribusi.
- Misalnya terminal, fasilitas publik yang dikelola secara usaha, penggunaan sarana pemerintah yang menghasilkan jasa yang dapat dikenai retribusi.

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pajak & Pembayaran Digital

- Layanan digital harus terus dikembangkan agar mudah digunakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama di daerah terpencil.

- Pelayanan offline tetap perlu diperkuat agar tidak ada warga yang tertinggal karena keterbatasan akses digital.
- Sosialisasi hukum / regulasi pajak agar publik memahami kewajiban dan manfaatnya.

5. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah

- Kerjasama dengan Polri (tilang elektronik / ETLE, pengesahan STNK), Jasa Raharja, perangkat desa/kelurahan untuk pendataan dan pengawasan.
- Sinergi swakelola pendataan dan penagihan dengan kabupaten/kota (contoh di Maros) agar data pemilik/pajak kendaraannya valid dan padat.

3. Bagaimana Potensi Itu Mendukung Kesejahteraan yang Berkeadilan

- Merata:
Dengan memperluas akses layanan pajak ke daerah pinggiran/perdesaan, masyarakat di sana juga mendapatkan kemudahan, tidak hanya warga di kota besar.
- Transparan & Akuntabel:
Digitalisasi dan penggunaan data yang baik membuat proses pungutan pajak lebih jelas, mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan.
- Redistributif:
Pendapatan daerah yang meningkat bisa dialokasikan untuk pelayanan publik dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur) di wilayah-wilayah yang tertinggal.
- Keadilan Pajak:
Dengan memperhatikan wajib pajak yang belum terjangkau atau belum patuh, dan memudahkan pembayaran, beban pajak tidak hanya ditanggung oleh segelintir orang.
- Daya Tahan Fiskal Daerah:
Mengurangi ketergantungan ke dana transfer pusat, sehingga daerah lebih mandiri dan bisa lebih fleksibel menyesuaikan program untuk kebutuhan masyarakat lokal.



Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategi Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak	Kecenderungan Pembangunan Wilayah yang Tidak Merata	Transformasi Digital dan Ekonomi Berbasis Teknologi	Reformasi Fiskal dan Perpajakan Nasional	Ketimpangan dan Ketergantungan Terhadap Sumber PAD Tertentu	Reformulasi Kebijakan PAD dan Intensifikasi Pajak Daerah
Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Teknologi	Tekanan Terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Krisis Iklim dan tekanan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah	Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak	Penguatan SDM dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan	Belum Optimalnya Kolaborasi Lintas Sektor dan Kelembagaan	Ketidakterataan Akses Layanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan	Integrasi Layanan Publik Berbasis Digital (SPBE)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata Antarwilayah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dan Digital

BAB III

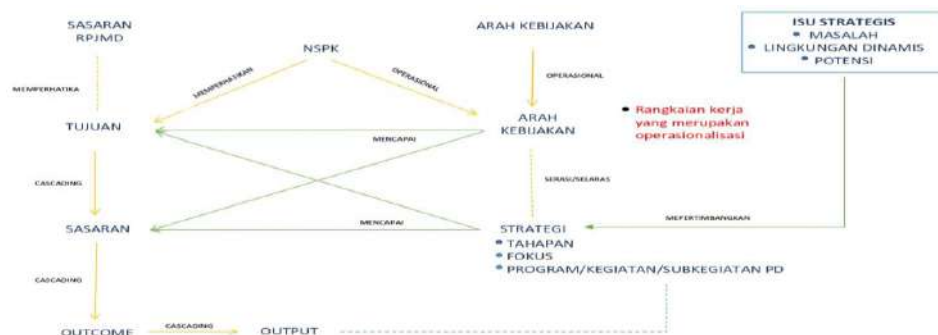
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bertujuan untuk memberikan arah strategis dan kerangka kerja dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Bapenda selama periode perencanaan (lima tahun). Tujuan utama dari Renstra ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, program, dan kebijakan yang dijalankan oleh Bapenda sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan yang ingin dicapai oleh Bapenda selama periode Renstra. Sasaran ditetapkan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, capaian kinerja masa lalu, serta tantangan dan peluang ke depan. Sasaran Bapenda umumnya bersifat terukur dan menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja.

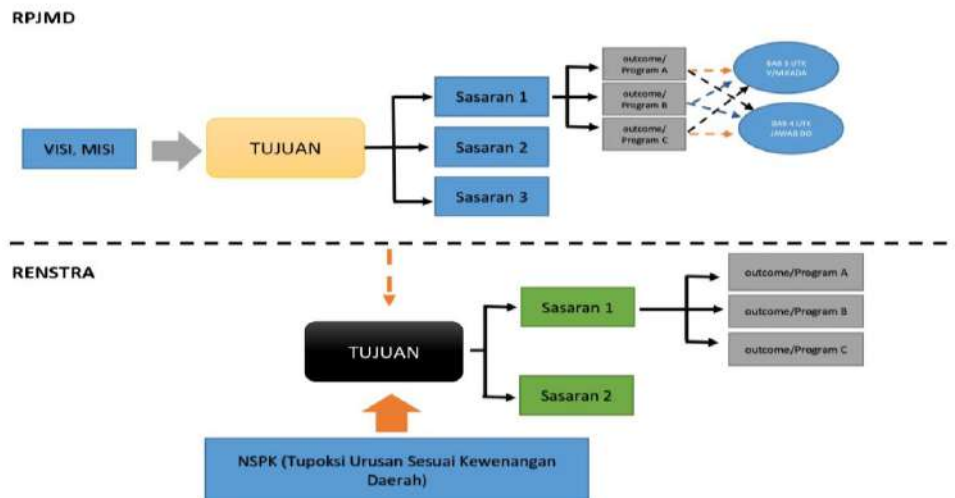
Tujuan dan sasaran bapenda berlandaskan data UU HKPD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dimana UU ini menggantikan beberapa ketentuan UU pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya, dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk kewenangan penetapan tarif, objek pajak, bagi hasil, opsen pajak, dan lain-lain. Kemudian didalam RPJMD Sulsel 2025-2029 dengan Visi “Sulsel maju dan Berkarakter, diantara dalam pembangunan kelima adalah peningkatan ekonomi daerah, penguatan nilai budaya, tata Kelola pemerintahan yng berintegrasi proiritas-prioritas Pembangunan yang disepakati, Dimana hal tersebut bersinergi dengan tujuan yang akan dicapai bapenda untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, sehingga keuangan daerah lebih mandiri dan mampu mendanai Pembangunan sesuai dengan prioritas RPJMD.

**Gambar 3.1
Konsep Renstra PD**



Sumber INMEN Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber INMEN Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (tahun) tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan yaitu **“Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan”** dengan indikator tujuan adalah persentase PAD terhadap APBD. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dirumuskan dua sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator Persentase Peningkatan PAD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Bapenda, dengan indikator Nilai sakip bapenda

Berikut ini adalah table Teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra bapenda:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran RPJMD 8: Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan		Persentase PAD Terhadap APBD	52.53%	52.55%	52.57%	52.66%	52.94%	53.13%	
		Sasaran 1: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	1.34%	6.04%	5.03%	3.00%	1.83%	2.84%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Bapenda	Nilai Sakip Bapenda	80.56	80.56	80.57	80.57	80.58	80.58	

2. Strategi Renstra Bapenda

Strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi ini dirancang untuk merespons dinamika lingkungan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan memastikan tahapan pembangunan yang terarah dan terukur.

1. Optimalisasi Sumber Daya

Bapenda Sulsel akan mengedepankan strategi optimalisasi terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan, teknologi, maupun kelembagaan. Penguatan kapasitas aparatur, modernisasi sistem perpajakan, dan pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

2. Penahapan Pembangunan (Prioritas Tahunan)

Strategi ini juga memuat tahapan implementasi program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan tahunan. Penahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahun pelaksanaan memiliki target yang realistis, fokus, dan progresif dalam mendukung pencapaian tujuan jangka menengah. Tahapan pembangunan akan disusun secara sinkron dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RKPD dan RPJMD.

3. Fokus Lingkungan Strategis yang Dinamis

Bapenda Sulsel akan senantiasa menyesuaikan strategi pelaksanaannya dengan perubahan lingkungan strategis, baik dari sisi regulasi nasional (misalnya penerapan UU HKPD), kondisi sosial ekonomi daerah, maupun perkembangan teknologi. Respons adaptif terhadap peluang dan tantangan menjadi kunci agar strategi tetap relevan dan efektif dalam setiap fase implementasi.

4. Penyajian Lokus Strategi dan Wilayah Pengembangan

Untuk meningkatkan fokus dan ketepatan intervensi, strategi Renstra Bapenda Sulsel akan disajikan dalam bentuk lokus pelaksanaan yang dibedakan berdasarkan wilayah:



- Pada tingkat Provinsi, penyajian lokus dapat dilakukan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau wilayah pengembangan, seperti wilayah pesisir, pegunungan, wilayah strategis ekonomi, dan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, serta kebutuhan pengembangan daerah.
- Pada tingkat Kabupaten/Kota, penyajian lokus strategi dapat dilakukan berdasarkan kecamatan dan/atau wilayah pengembangan lokal, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta ketersediaan infrastruktur pendukung layanan perpajakan.

5. Upaya Strategis Utama

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Renstra, beberapa upaya strategis utama yang akan dilaksanakan meliputi:

- Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah melalui basis data yang valid dan sistem pengawasan yang ketat.
- Penerapan sistem informasi perpajakan dan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis digital.
- Pengembangan regulasi dan kebijakan perpajakan daerah yang adaptif terhadap UU HKPD dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat.
- Peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi dengan mengedepankan prinsip transparansi, kemudahan, dan kepastian.
- Penguatan sinergi dan kolaborasi antara Bapenda Provinsi dan Bapenda Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta pengembangan inovasi daerah.

**Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD**

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
◆ Pemutakhiran Awal Data Pajak -Inventarisasi dan verifikasi objek pajak daerah -Penataan ulang basis data pajak lama -Penyesuaian regulasi teknis pengelolaan PAD	◆ Penguatan dan Digitalisasi Data -Pengembangan aplikasi basis data pajak -Pelatihan SDM Bapenda untuk entri & pemanfaatan data -Integrasi awal dengan data OPD lain (DPMPSTP, Disdukcap)	◆ Pemanfaatan Data untuk Optimalisasi PAD -Penggunaan basis data untuk intensifikasi pemungutan pajak -Penambahan fitur analitik untuk prediksi dan targeting pajak -Interkoneksi dengan sistem pelayanan publik & perizinan	◆ Ekstensifikasi & Otomatisasi -Pemanfaatan basis data untuk ekspansi WP baru -Otomatisasi notifikasi dan tagihan pajak -Pengembangan dashboard manajemen kinerja PAD	◆ Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan -Evaluasi dampak subkegiatan terhadap peningkatan PAD -Evaluasi dampak subkegiatan terhadap peningkatan PAD -Penyusunan rekomendasi lanjutan untuk Renstra berikutnya

-Penyusunan SOP subkegiatan basis data	-Monitoring efektivitas pengelolaan data pajak	-Evaluasi dan pembaruan SOP	-Kolaborasi dengan bank/penyedia pembayaran digital	
--	--	-----------------------------	---	--

3. Arah Kebijakan Renstra Bapenda

Arah kebijakan Renstra Bapenda Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja sistematis yang menjadi operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Sulsel.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung peningkatan kinerja pendapatan daerah, penguatan akuntabilitas kelembagaan, serta optimalisasi layanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah (PAD)	Pengembangan sistem informasi perpajakan daerah berbasis digital dan terintegrasi	Selaras dengan kebijakan SPBE nasional dan transformasi digital layanan publik
2	Peningkatan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi	Peningkatan kapasitas aparatur daerah	Penguatan kompetensi ASN dalam pelayanan pajak, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi	Dikaitkan dengan program pelatihan terpadu berbasis kompetensi
3	Sinergi dan integrasi data antar-lembaga	Kolaborasi dan konektivitas antar OPD dan instansi vertikal	Integrasi sistem informasi antara Bapenda, Kepolisian, Samsat, Bank, dan OPD teknis lainnya	Mendukung efisiensi layanan dan pengawasan pajak daerah
4	Penerapan reward and punishment dalam kepatuhan pajak	Peningkatan kepatuhan dan partisipasi masyarakat	Pengembangan insentif dan sanksi administratif untuk wajib pajak daerah	Menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak di Sulsel
5	Penyederhanaan layanan perpajakan	Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan transparan	Implementasi layanan pajak online dan pembayaran multi-kanal	Mendukung peningkatan kepuasan masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 merupakan hasil *cascading* langsung dari pernyataan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja berupa outcome dan output. Setiap program dan kegiatan telah disusun secara sistematis untuk memastikan keterkaitan logis antara arah kebijakan strategis dengan upaya pencapaian target kinerja perangkat daerah.

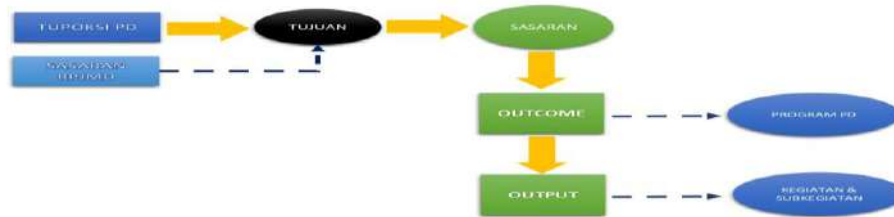
Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu secara ketat pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD), serta pemutakhiran regulasi teknis yang mengatur kodefikasi dan klasifikasi program dan kegiatan perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan mempermudah proses penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Rentang pelaksanaan program dan kegiatan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, sesuai dengan periode target RPJMD dan Renstra PD. Secara khusus, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2030 diarahkan sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030, sehingga memastikan kesinambungan perencanaan dan transisi yang efektif menuju periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, program dan kegiatan tahun 2030 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari strategi jangka menengah yang telah dirancang sejak awal periode Renstra.

Seluruh program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu strategis global, nasional, maupun lokal serta tetap memperhatikan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan fiskal, dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Dari penjelasan gambar diatas maka Bapenda menyusun Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode Renstra 2025-2029 meliputi:

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda Prov. Sulsel untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah dibidang pendapatan secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Program ini memiliki 2 Kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, yang meliputi 9 subkegiatan, antara lain:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang meliputi 2 subkegiatan, antara lain:

1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH adalah bagian penting dari manajemen keuangan daerah yang berfokus pada upaya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber pendapatan yang dimiliki oleh Bapenda, guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Program ini memiliki 1 Kegiatan, yaitu **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** yang meliputi 14 subkegiatan, antara lain:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10. Penagihan Pajak Daerah
11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI adalah program yang berfungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan rutin yang menjadi kewenangan Bapenda provinsi, baik urusan wajib maupun pilihan. Program ini tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan publik utama, tetapi sangat penting karena menjadi fondasi administrasi, koordinasi, dan operasionalisasi Bapenda. Program ini memiliki 9 Kegiatan, antara lain:

- 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang memiliki 8 subkegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang memiliki 6 subkegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** yang memiliki 7 subkegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** yang memiliki 3 subkegiatan, yaitu:
 1. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 3. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** yang memiliki 5 subkegiatan, yaitu:
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelemngkapannya
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** yang memiliki 5 subkegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang memiliki 6 subkegiatan, yaitu:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang memiliki 4 subkegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang memiliki 6 subkegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 6. Pemeliharaan Mebel

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Bapenda

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan		Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Diluar Pajak Daerah		Persentase PAD Terhadap APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Rencana Target Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah yang Tervalidasi	Persentase Peningkatan PAD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
				Persentase laporan Pendapatan Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Provinsi yang Tervalidasi		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
			Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Capaian Pajak Daerah (Rp)		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		Penagihan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Bapenda	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi		Nilai Sakip Bapenda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diamou dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Capaian Target Pendapatan Perangkat Daerah		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				Persentase Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pengadaan BMD		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase terpeliharanya BMD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		Pemeliharaan Mebel	



**Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Keuangan															
BADAN PENDAPATAN DAERAH				173.810.645.769,00		176.624.443.967,00		179.508.579.338		161.464.818.094,00		164.494.962.818,00		167.600.861.161,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Sasaran Program: Meningkatnya PAD diluar Pajak Daerah	Persentase Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Diluar Pajak Daerah	100%	100%	331,103,400.00	100 %	331,103,400.00	100%	331,103,400.00	100%	331,103,400.00	100%	331,103,400.00	100%	331,103,400.00	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rencana Target Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah yang Tervalidasi		31 Perangkat Daerah	165,052,000.00	31 Perangkat Daerah	165,052,000.00	31 Perangkat Daerah	165,052,000.00	31 Perangkat Daerah	165,052,000.00	31 Perangkat Daerah	165,052,000.00	31 Perangkat Daerah	165,052,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		1 Dokumen	395,600.00	1 Dokumen	395,600.00	1 Dokumen	395,600.00	1 Dokumen	395,600.00	1 Dokumen	395,600.00	1 Dokumen	395,600.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		1 Dokumen	24,224,700.00	1 Dokumen	24,224,700.00	1 Dokumen	24,224,700.00	1 Dokumen	24,224,700.00	1 Dokumen	24,224,700.00	1 Dokumen	24,224,700.00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	54,573,400.00	1 Dokumen	54,573,400.00	1 Dokumen	54,573,400.00	1 Dokumen	54,573,400.00	1 Dokumen	54,573,400.00	1 Dokumen	54,573,400.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	385,900.00	1 Dokumen	385,900.00	1 Dokumen	385,900.00	1 Dokumen	385,900.00	1 Dokumen	385,900.00	1 Dokumen	385,900.00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	82,326,300.00	1 Dokumen	82,326,300.00	1 Dokumen	82,326,300.00	1 Dokumen	82,326,300.00	1 Dokumen	82,326,300.00	1 Dokumen	82,326,300.00	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	1,249,000.00	1 Dokumen	1,249,000.00	1 Dokumen	1,249,000.00	1 Dokumen	1,249,000.00	1 Dokumen	1,249,000.00	1 Dokumen	1,249,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		1 Dokumen	944,800.00	1 Dokumen	944,800.00	1 Dokumen	944,800.00	1 Dokumen	944,800.00	1 Dokumen	944,800.00	1 Dokumen	944,800.00	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Dokumen	250,800.00	1 Dokumen	250,800.00	1 Dokumen	250,800.00	1 Dokumen	250,800.00	1 Dokumen	250,800.00	1 Dokumen	250,800.00	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		1 Dokumen	701,500.00	1 Dokumen	701,500.00	1 Dokumen	701,500.00	1 Dokumen	701,500.00	1 Dokumen	701,500.00	1 Dokumen	701,500.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan Pendapatan Perangkat Daerah Lngkup Pemerintah Provinsi yang Tervalidasi	100%	100%	166,051,400.00	100%	166,051,400.00	100%	166,051,400.00	100%	166,051,400.00	100%	166,051,400.00	100%	166,051,400.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		12 laporan	141,577,300.00	12 laporan	141,577,300.00	12 laporan	141,577,300.00	12 laporan	141,577,300.00	12 laporan	141,577,300.00	12 laporan	141,577,300.00	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		2 Dokumen	24,474,100.00	2 Dokumen	24,474,100.00	2 Dokumen	24,474,100.00	2 Dokumen	24,474,100.00	2 Dokumen	24,474,100.00	2 Dokumen	24,474,100.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
Sasaran Program: Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	100%	100%	28,849,970,800.00	100%	28,849,978,392.00	100%	28,849,978,392.00	100%	7,849,978,392.00	100%	7,849,978,392.00	100%	7,849,978,392.00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah Dalam Rp		4.333.746.209.64 2	28,849,970,800.00	4.333.746.209.64 2	28,849,978,392.00	4.333.746.209.64 2	28,849,978,392.00	4.333.746.209.64 2	7,849,978,392.00	4.333.746.209.64 2	7,849,978,392.00	4.333.746.209.64 2	7,849,978,392.00	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen	375,365,800.00	2 Dokumen	375,365,800.00	2 Dokumen	375,365,800.00	2 Dokumen	375,365,800.00	2 Dokumen	375,365,800.00	2 Dokumen	375,365,800.00	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	72,556,200.00	1 Laporan	72,556,200.00	1 Laporan	72,556,200.00	1 Laporan	72,556,200.00	1 Laporan	72,556,200.00	1 Laporan	72,556,200.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	14,662,000.00	1 Laporan	14,662,000.00	1 Laporan	14,662,000.00	1 Laporan	14,662,000.00	1 Laporan	14,662,000.00	1 Laporan	14,662,000.00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	25 Sarana dan Prasarana	2,286,252,700.00	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	1,202,579,900.00	12 Laporan	1,202,579,900.00	12 Laporan	1,202,579,900.00	12 Laporan	1,202,579,900.00	12 Laporan	1,202,579,900.00	12 Laporan	1,202,579,900.00	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		12 Laporan	21,833,519,200.00	12 Laporan	21,833,526,792.00	12 Laporan	21,833,526,792.00	12 Laporan	833,526,792.00	12 Laporan	833,526,792.00	12 Laporan	833,526,792.00	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	12 Dokumen Ketetapan	37,589,300.00	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		12 Laporan	96,885,600.00	12 Laporan	96,885,600.00	12 Laporan	96,885,600.00	12 Laporan	96,885,600.00	12 Laporan	96,885,600.00	12 Laporan	96,885,600.00	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		12 Dokumen	220,950,800.00	12 Dokumen	220,950,800.00	12 Dokumen	220,950,800.00	12 Dokumen	220,950,800.00	12 Dokumen	220,950,800.00	12 Dokumen	220,950,800.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET :
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		25 Dokumen SSPD	2.571.873.000.00	25 Dokumen SSPD	2.571.873.000.00	25 Dokumen SSPD	2.571.873.000.00	25 Dokumen SSPD	2.571.873.000.00	25 Dokumen SSPD	2.571.873.000.00	25 Dokumen SSPD	2.571.873.000.00	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti		2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	2 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	28,671,800.00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Laporan	54,268,500.00	12 Laporan	54,268,500.00	12 Laporan	54,268,500.00	12 Laporan	54,268,500.00	12 Laporan	54,268,500.00	12 Laporan	54,268,500.00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Laporan	54,796,000.00	12 Laporan	54,796,000.00	12 Laporan	44,796,000.00	12 Laporan	44,796,000.00	12 Laporan	44,796,000.00	12 Laporan	44,796,000.00	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					-	2 Laporan	10,000,000.00	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Tersedianya layanan perangkat daerah untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	#####	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu	100%	100%	638,311,600.00	100%	638,311,600.00	100%	638,311,600.00	100%	638,311,600.00	100%	638,311,600.00	100%	638,311,600.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	447,675,000.00	2 Dokumen	447,675,000.00	2 Dokumen	447,675,000.00	2 Dokumen	447,675,000.00	2 Dokumen	447,675,000.00	2 Dokumen	447,675,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokumen	30,150,600.00	1 Dokumen	30,150,600.00	1 Dokumen	30,150,600.00	1 Dokumen	30,150,600.00	1 Dokumen	30,150,600.00	1 Dokumen	30,150,600.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		1 Dokumen	13,000,000.00	1 Dokumen	13,000,000.00	1 Dokumen	13,000,000.00	1 Dokumen	13,000,000.00	1 Dokumen	13,000,000.00	1 Dokumen	13,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	70,246,000.00	1 Dokumen	70,246,000.00	1 Dokumen	70,246,000.00	1 Dokumen	70,246,000.00	1 Dokumen	70,246,000.00	1 Dokumen	70,246,000.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan SKPD		1 Laporan	5,850,000.00	1 Laporan	5,850,000.00	1 Laporan	5,850,000.00	1 Laporan	5,850,000.00	1 Laporan	5,850,000.00	1 Laporan	5,850,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	66,390,000.00	5 Laporan	66,390,000.00	5 Laporan	56,390,000.00	5 Laporan	56,390,000.00	5 Laporan	56,390,000.00	5 Laporan	66,390,000.00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diamou dalam Rangka Penyusunann Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Berita Acara	10,000,000	1 Berita Acara	10,000,000	1 Berita Acara	10,000,000	1 Berita Acara		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100%	100%	112.707.263.643,00	100%	114.521.054.249,00	100%	117.405.189.620,00	100%	120.361.428.376,00	100%	123.391.573.100,00	100%	126.497.471.443,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		530 Orang/ Bulan	112.551,624,243.00	530 Orang/ Bulan	114,365,414,849.00	530 Orang/ Bulan	117,249,550,220.00	530 Orang/ Bulan	120,205,788,976.00	530 Orang/ Bulan	123,235,933,700.00	530 Orang/ Bulan	126,341,832,043.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatubshaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	103,966,600.00	12 Dokumen	103,966,600.00	12 Dokumen	100,966,600.00	12 Dokumen	103,966,600.00	12 Dokumen	103,966,600.00	12 Dokumen	103,966,600.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-					12 Dokumen	1.500,000.00	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 Dokumen	51,672,800.00	12 Dokumen	51,672,800.00	12 Dokumen	50,672,800.00	12 Dokumen	51,672,800.00	12 Dokumen	51,672,800.00	12 Dokumen	51,672,800.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	-					12 laporan	1.500,000.00	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-					1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	5 Dokumen	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	100%	100%	174,481,900.00	100%	174,481,900.00	100%	174,481,900.00	100%	174,481,900.00	100%	174,481,900.00	100%	174,481,900.00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	50,384,300.00	2 Dokumen	50,384,300.00	2 Dokumen	50,384,300.00	2 Dokumen	50,384,300.00	2 Dokumen	50,384,300.00	2 Dokumen	50,384,300.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	23,636,600.00	1 Dokumen	23,636,600.00	1 Dokumen	20,636,600.00	1 Dokumen	20,636,600.00	1 Dokumen	20,636,600.00	1 Dokumen	20,636,600.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-					1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	1,000,000.00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-					25 Laporan	1,000,000.00	25 Laporan	1,000,000.00	25 Laporan	1,000,000.00	25 Laporan	1,000,000.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	51,612,000.00	4 Laporan	51,612,000.00	4 Laporan	51,612,000.00	4 Laporan	51,612,000.00	4 Laporan	51,612,000.00	4 Laporan	51,612,000.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	48,849,000.00	4 Laporan	48,849,000.00	4 Laporan	48,849,000.00	4 Laporan	48,849,000.00	4 Laporan	48,849,000.00	4 Laporan	48,849,000.00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	1,000,000.00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kevenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Perangkat Daerah	100%	100%	131,653,400.00	100%	131,653,400.00	100%	131,653,400.00	100%	131,653,400.00	100%	131,653,400.00	100%	131,653,400.00	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	69,581,700.00	2 Dokumen	69,581,700.00	2 Dokumen	69,581,700.00	2 Dokumen	69,581,700.00	2 Dokumen	69,581,700.00	2 Dokumen	69,581,700.00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 Laporan	19,663,300.00	1 Laporan	19,663,300.00	1 Laporan	19,663,300.00	1 Laporan	19,663,300.00	1 Laporan	19,663,300.00	1 Laporan	19,663,300.00	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		4 Laporan	42,408,400.00	4 Laporan	42,408,400.00	4 Laporan	42,408,400.00	4 Laporan	42,408,400.00	4 Laporan	42,408,400.00	4 Laporan	42,408,400.00	
Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaiaan Perangkat Daerah	100%	100 %	203,348,800.00	100 %	203,348,800.00	100 %	203,348,800.00	100 %	203,348,800.00	100 %	203,348,800.00	100 %	203,348,800.00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2 Unit	26,186,600.00	2 Unit	26,186,600.00	2 Unit	26,186,600.00	2 Unit	26,186,600.00	2 Unit	26,186,600.00	2 Unit	26,186,600.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						528 Paket	100,000,000.00	528 Paket	100,000,000.00	528 Paket	100,000,000.00	528 Paket	100,000,000.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan		12 Dokumen	26,326,600.00	12 Dokumen	26,326,600.00	12 Dokumen	26,326,600.00	12 Dokumen	26,326,600.00	12 Dokumen	26,326,600.00	12 Dokumen	26,326,600.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET :
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 Dokumen	150,485,600.00	12 Dokumen	150,485,600.00	12 Dokumen	50,485,600.00	12 Dokumen	50,485,600.00	12 Dokumen	50,485,600.00	12 Dokumen	50,485,600.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	350,000.00	10 Orang	350,000.00	10 Orang	350,000.00	10 Orang	350,000.00	10 Orang	350,000.00	10 Orang	350,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor	100%	100 %	6,199,479,200.00	100 %	6,249,479,200.00	100 %	6,249,479,200.00	100 %	6,249,479,200.00	100 %	6,249,479,200.00	100 %	6,249,479,200.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	60,004,000.00	4 Paket	60,004,000.00	4 Paket	60,004,000.00	4 Paket	60,004,000.00	4 Paket	60,004,000.00	4 Paket	60,004,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	52,581,000.00	4 Paket	52,581,000.00	4 Paket	52,581,000.00	4 Paket	52,581,000.00	4 Paket	52,581,000.00	4 Paket	52,581,000.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	4,439,500,000.00	3 Paket	4,439,500,000.00	3 Paket	4,439,500,000.00	3 Paket	4,439,500,000.00	3 Paket	4,439,500,000.00	3 Paket	4,439,500,000.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	198,708,000.00	12 Laporan	198,708,000.00	12 Laporan	198,708,000.00	12 Laporan	198,708,000.00	12 Laporan	198,708,000.00	12 Laporan	198,708,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	1,239,080,800.00	12 Laporan	1,239,080,800.00	12 Laporan	1,239,080,800.00	12 Laporan	1,239,080,800.00	12 Laporan	1,239,080,800.00	12 Laporan	1,239,080,800.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	209,605,400.00	12 Dokumen	259,605,400.00	12 Dokumen	259,605,400.00	12 Dokumen	259,605,400.00	12 Dokumen	259,605,400.00	12 Dokumen	259,605,400.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	100%	100%	50,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	100 %	1,000,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0		0		0		0	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Paket	25,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 Unit	25,000,000.00	25 Unit	500,000,000.00	25 Unit	500,000,000.00	25 Unit	500,000,000.00	25 Unit	300,000,000.00	25 Unit	300,000,000.00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			-	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100%	100 %	22,059,205,976.00	100 %	22,059,205,976.00	100 %	22,059,205,976.00	100 %	22,059,205,976.00	100 %	22,059,205,976.00	100 %	22,059,205,976.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	211,060,000.00	12 Laporan	211,060,000.00	12 Laporan	211,060,000.00	12 Laporan	211,060,000.00	12 Laporan	211,060,000.00	12 Laporan	211,060,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	9,187,576,898.00	12 Laporan	9,187,576,898.00	12 Laporan	9,187,576,898.00	12 Laporan	9,187,576,898.00	12 Laporan	9,187,576,898.00	12 Laporan	9,187,576,898.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	97,210,000.00	12 Laporan	97,210,000.00	12 Laporan	97,210,000.00	12 Laporan	97,210,000.00	12 Laporan	97,210,000.00	12 Laporan	97,210,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12,563,359,078.00	12 Laporan	12,563,359,078.00	12 Laporan	12,563,359,078.00	12 Laporan	12,563,359,078.00	12 Laporan	12,563,359,078.00	12 Laporan	12,563,359,078.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD	100%	100 %	2,465,827,050.00	100 %	2,465,827,050.00	100 %	2,465,827,050.00	100 %	2,465,827,050.00	100 %	2,465,827,050.00	100 %	2,465,827,050.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		30 Unit	392,644,800.00	30 Unit	392,644,800.00	30 Unit	392,644,800.00	30 Unit	392,644,800.00	30 Unit	392,644,800.00	30 Unit	392,644,800.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	624,098,250.00	30 Unit	624,098,250.00	30 Unit	624,098,250.00	30 Unit	624,098,250.00	30 Unit	624,098,250.00	30 Unit	624,098,250.00	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU ANGGARAN												KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	650,750,000.00	50 Unit	650,750,000.00	50 Unit	650,750,000.00	50 Unit	650,750,000.00	50 Unit	650,750,000.00	50 Unit	650,750,000.00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		5 Unit	508,000,000.00	5 Unit	508,000,000.00	5 Unit	500,000,000.00	5 Unit	500,000,000.00	5 Unit	500,000,000.00	5 Unit	500,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	290,334,000.00	1 Unit	290,334,000.00	1 Unit	290,334,000.00	1 Unit	290,334,000.00	1 Unit	290,334,000.00	1 Unit	290,334,000.00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		0	5 Mebel	8,000,000.00	5 Mebel	8,000,000.00	5 Mebel	8,000,000.00	5 Mebel	8,000,000.00	

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Priorits dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Bapenda

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan PAD	%	1.34	6.04	5.03	3	1.83	2.84	
2	Nilai Sakip Bapenda	Nilai	80.75	81	81.25	81.5	81.75	82	



**Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai Pajak Daerah Dalam Rp	Rp	4,333,746,209,642	4,333,746,209,642	4,333,746,209,642	4,333,746,209,642	4,333,746,209,642	4,333,746,209,642	

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya Tujuan 17 tentang “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan pendapatan daerah lainnya, termasuk melalui dukungan internasional untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tiga indikator utama yang menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah dalam periode perencanaan tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut:

1. Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDRB Menurut Sumbernya

Target indikator ini menunjukkan upaya peningkatan kontribusi pendapatan pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2024, proporsi pendapatan tercatat sebesar 0,77%. Target capaian secara bertahap diturunkan untuk tahun 2025 hingga 2030, yaitu menjadi 0,69% pada 2025 dan menurun hingga 0,55% pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian terhadap realisasi dan struktur ekonomi daerah yang dinamis serta reformasi kebijakan fiskal.

2. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengumpulan pajak terhadap kapasitas ekonomi daerah. Pada tahun 2024, rasio penerimaan pajak terhadap PDRB sebesar 0,69%, dengan target penurunan bertahap menjadi 0,48% di tahun 2030. Penyesuaian ini mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan PDRB dan rasionalisasi potensi pajak.

3. Proporsi Anggaran Domestik yang Dibiayai oleh Pajak Domestik

Indikator ini mengukur kemandirian fiskal daerah melalui proporsi pembiayaan anggaran yang berasal dari pajak domestik. Tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 60,94%. Target capaian untuk tahun 2025–2030 disusun dengan mempertimbangkan penguatan penerimaan pajak dan efisiensi belanja daerah, dengan target 2030 sebesar 53,09%.

Seluruh indikator tersebut bersumber dari data Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik, serta menjadi acuan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berkelanjutan. Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi pelaksana akan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, inovasi sistem pemungutan pajak, serta menjalin kemitraan strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Penjelasan SDGs ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.7
Indikator Sustainable Development Goals
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030

Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN 17 KEMINTRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya										
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Badan Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik	Persen	0.77	0.69	0.64	0.62	0.6	0.57	0.55	Badan Pendapatan Daerah
Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah Badan Pusat Statistik	Persen	0.69	0.58	0.56	0.53	0.51	0.49	0.48	Badan Pendapatan Daerah
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan Pendapatan Daerah	Persen	60.94	60.34	53.77	53.78	53.84	53.03	53.09	Badan Pendapatan Daerah

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting secara substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara substansial, pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda Sulsel menunjukkan keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini selaras dengan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi titik fokus utama.

Kaidah pelaksanaan diarahkan pada penguatan sistem digitalisasi layanan pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kebijakan berbasis data menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui indikator kinerja utama, capaian realisasi pendapatan, serta kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan serta penyusunan strategi pada periode perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh Bapenda Sulsel tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga kontribusi nyata terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan berkelanjutan.